



**ANALISIS KEMISKINAN MASYARAKAT *OSING*  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

*Analysis of Poverty Osing's In Banyuwangi*

**TESIS**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Ekonomi dan Mencapai gelar Magister Ilmu Ekonomi

**OLEH: AHMAD SUBHAN, SE**

**NIM. 130820201019**

**DPU: Dr. Rafael Purতোমো S, M.Si**

**DPA: Dr. Lilis Yuliati SE, M.Si**

**MAGISTER ILMU EKONOMI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**ANALISIS KEMISKINAN MASYARAKAT *OSING*  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

*Analysis of Poverty Osing's In Banyuwangi*

**TESIS**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Ekonomi dan Mencapai gelar Magister Ilmu Ekonomi

**OLEH: AHMAD SUBHAN, SE**

**NIM. 130820201019**

**DPU: Dr. Rafael Purতোমো S, M.Si**

**DPA: Dr. Lilis Yulianti SE, M.Si**

**MAGISTER ILMU EKONOMI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Tesis ini disetujui

Tanggal :

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Rafael Purtono S, M.Si  
NIP. 19581024198831001

Pembimbing Anggota

Dr. Lilis Yuliati, SE, M.Si  
NIP: 196907181995122001

Mengetahui  
Pascasarjana Universitas Jember  
Program Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Siti Komariyah, SE, MSi  
NIP. 19710610 20012 2 002

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**ANALISIS KEMISKINAN MASYARAKAT *OSING*  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

*Analysis of Poverty Osing's In Banyuwangi*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Subhan, SE.

**NIM.** : **130820201019**

**Program Studi** : **Magister Ilmu Ekonomi**

Konsentrasi : Perencanaan Daerah

telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal :

29 Juni 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan memperoleh Magister Ilmu Ekonomi pada program studi S-2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember

Susunan Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E, M.P

NIP. 195608311984031002

Anggota I

Dr. Herman Cahyo Diartho SE, M.P

NIP. 197207131999031001

Anggota II

Dr. Teguh Hadi Priyono, M.Si

NIP. 19700206 199403 1 002

Dr. Rafael Purtomo Somaji, M.Si

NIP 19581024 198803 1 001

Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Dekan Fakultas Ekonomi,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si

NIP. 19630614 199002 1 001

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Subhan, SE

NIM : 130820201019

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:  
“**Analisis Kemiskinan Masyarakat *Osing* di Kabupaten Banyuwangi**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum

pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2015

Yang menyatakan,



Ahmad Subhan, SE

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Tesis ini dipersembahkan kepada:**

1. Istri Kholida yang telah memberikan dorongan spirit dan materi serta pengorbanan.

2. Anaku-anaku Heldyanita dan Robby yang turut membantu spirit.
3. Teman-temanku Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 2013
4. Almamaterku Tercinta.



**HALAMAN MOTTO**

Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya” (QS. Ath-Thalaq: 3).



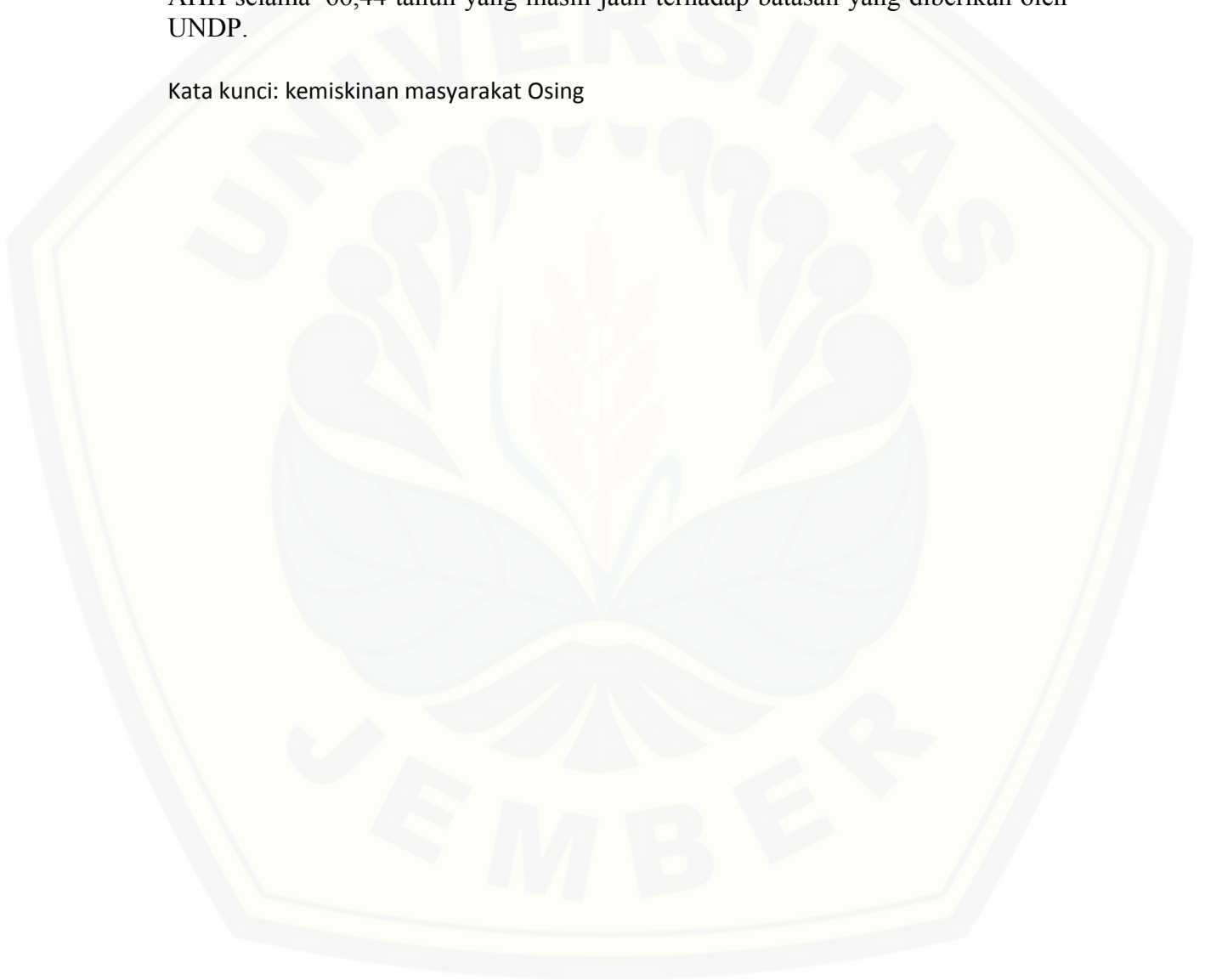
### **ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemiskinan masyarakat Osing di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat *Osing* di Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Glagah khususnya desa Kemiren, Oleh Sari dan Taman Suruh. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan beberapa kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit



berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Kemiskinan di Kecamatan Banyuwangi masih termasuk karetegori tinggi. Hal itu dilihat dari indeks pendidikan yang terukur di Kecamatan Glagah angkanya masih selalu berada di bawah angka rata-rata Provinsi Jawa Timur. Ini artinya ketertinggalan pembangunan bidang pendidikan di Kecamatan Glagah masih belum bisa teratasi dengan baik. Pada tahun 2014 AHH bagi penduduk Kecamatan Glagah terukur 66,44 tahun. Artinya rata-rata lama hidup bagi penduduk Kecamatan Glagah selama 66 tahun 5 bulan. Jadi tingkat capaian pembangunan di bidang kesehatan untuk Kecamatan Glagah masih belum cukup untuk bisa dikategorikan berhasil, karena selain Kecamatan Glagah mempunyai AHH selama 66,44 tahun yang masih jauh terhadap batasan yang diberikan oleh UNDP.

Kata kunci: kemiskinan masyarakat Osing





**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to describe poverty were Osing community in Banyuwangi. This study used qualitative research methods. Research was conducted on Osing community in Banyuwangi in District Glagah especially Kemiren village, by Sari and Taman Suruh. Based on the results of the analysis showed some of the conclusions that the Human Development Index (HDI) is calculated based on three composite index comprised of indices of education, health and purchasing power. Poverty in the district of Banyuwangi still including high categorical. It was seen from the education index measured in District Glagah her figure still always below the average number of East Java Province. This means underdevelopment in education in Sub Glagah still not resolved properly. In 2014 AHH for District residents Glagah measured 66.44 years. This means that the average length of life for the residents of the District for 66 years Glagah 5 bulan. Jadi level of development achievements in the field of health for the District Glagah still not enough to be categorized succeed, because in addition to the District Glagah have AHH for 66.44 years which is still far to the limit provided by the UNDP.*

*Keywords: poverty, Community, Osing*

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT serta hidayahNya, yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan Tesis ini. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi S-2 (Magister Ilmu Ekonomi) Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Selain itu, dalam penulisan Tesis ini banyak pihak yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung. Sebagai ungkapan bahagia, maka pada kesempatan ini penulis mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Dr. Siti Komariyah, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
3. Dr. RafaelPurtomo S. SE., M.Si, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Lilis Yuliati, SE., M.Si, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan saran sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
6. Teman-temanku angkatan 2013
7. Seluruh pihak yang membantu semangat dan dorongan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, maka disadari sepenuhnya tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan.

Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat dan guna bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Ekonomi pada khususnya.

22 Juni 2015

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>10</b>
2.1.1 Kemiskinan .....	10
2.1.2 Pembangunan .....	14
2.1.3 Otonomi Daerah .....	16
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	18
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia: Pengukuran Pencapaian Pembangunan .....	22
2.1.6 Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia .....	23
<b>2.2 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>25</b>

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	26
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	27
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.3 Lokasi Penelitian .....	28
3.4 Teknik Pemilihan Informan .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.5.1 Wawancara .....	29
3.5.2 Observasi .....	29
3.5.3 Studi Pustaka .....	30
3.6 Keabsahan Data .....	30
3.7 Validitas Data .....	32
3.7.1 Triangulasi .....	32
3.7.2 Triangulasi Sumber .....	33
3.8 Metode Analisis Data .....	33
3.8.1 Reduksi Data .....	34
3.8.2 Penyajian Data .....	34
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	35
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi .....	35
4.1.2 Gambaran Umum Suku Osing Bayuwangi .....	40
4.1.3 Deskripsi IPM Banyuwangi .....	43
4.1.4 Analisis Kemiskinan Masyarakat Osing di Banyuwangi .....	45
4.1.5 Pendidikan Informan .....	55
4.1.6 Kemiskinan di Kecamatan Glagah Banyuwangi .....	56
4.1.7 Kondisi Kehidupan Masyarakat Osing dalam Kemiskinan ...	57
4.1.8 Kebutuhan Yang Harus Dipenuhi .....	63
4.1.9 Upaya Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Osing .....	65
4.3 Pembahasan .....	70
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan .....	73

<b>5.2 Saran .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





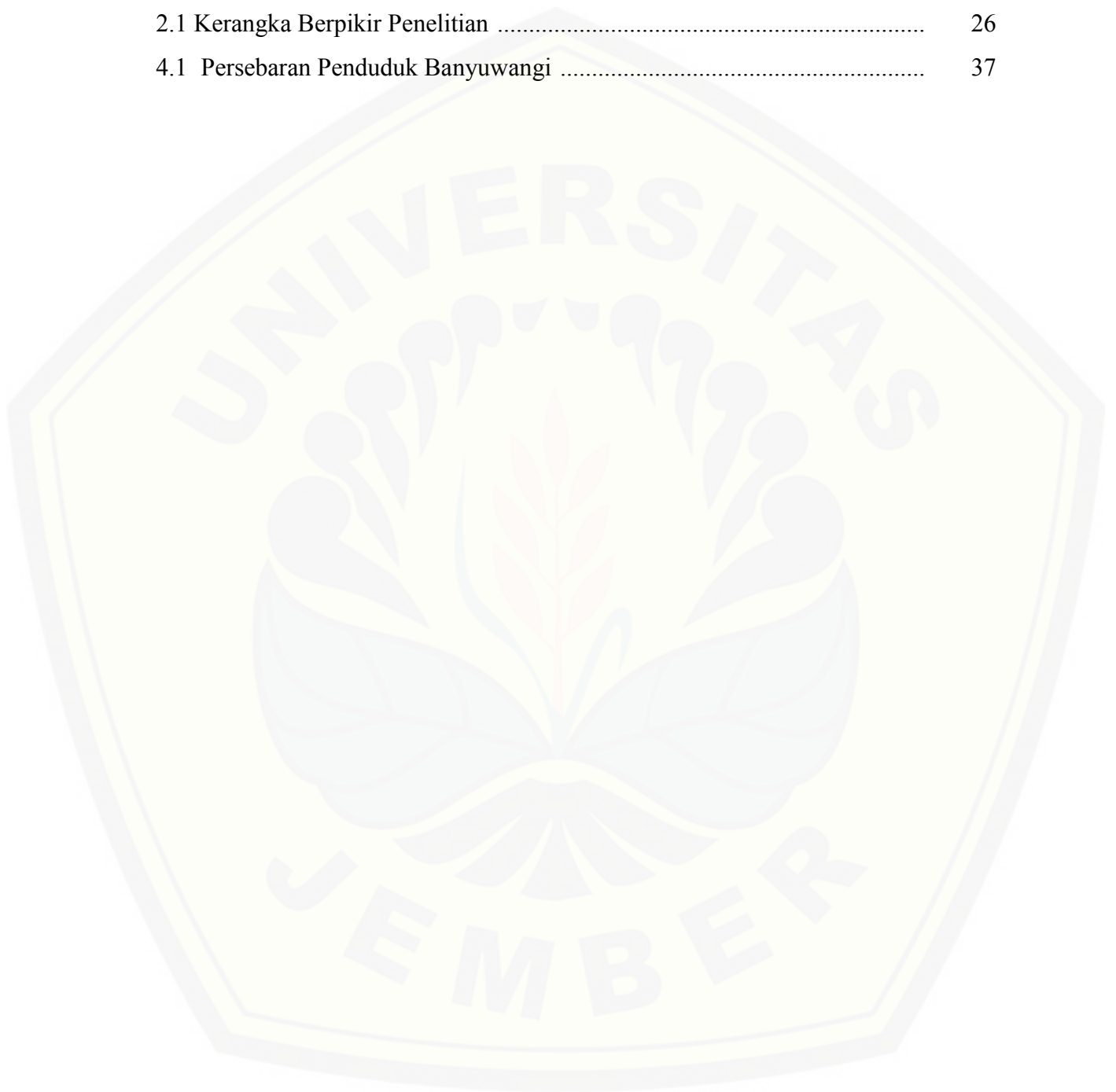
**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1 Data IPM Jawa Timur Tahun 2009-2011 .....	2
1.2 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2011–Maret 2012 .....	3
1.3 Indeks IPM Seluruh Kecamatan Kabupaten Banyuwangi .....	6
2.1 Batas Maksimum dan Minimum Komponen IPM .....	24
2.2 Kriteria IPM .....	24
4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000, 2010 dan 2012 .....	38
4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan sex ratio .....	39
4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan ( P1 ), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2), 2010-2013 .....	44
4.4 APS dan Angka Putus Sekolah Kecamatan Glagah Tahun 2014 .....	46
4.5 Angka Buta Huruf di Kecamatan Glagah Tahun 2014 (%) .....	48
4.6 Identitas Informan Pokok .....	54
4.7 Usia Informan Pokok .....	54
4.8 Tingkat Pendidikan Informan Pokok .....	55



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir Penelitian .....	26
4.1 Persebaran Penduduk Banyuwangi .....	37



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi



## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penduduk Indonesia lebih dari 110 juta masih hidup dalam kemiskinan dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari, bahkan sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara bertempat tinggal di Indonesia (UNDP report, 2007). Kemiskinan menjadi salah satu pemicu terjadinya tekanan terhadap lingkungan yang luar biasa. Degradasi dan kerusakan lingkungan sulit dihindarkan ketika penduduk masih dililit kemiskinan. Intensitas pemanfaatan sumberdaya semakin tinggi karena hanya inilah sebagai satu-satunya tempat bergantung bagi kelangsungan hidup dalam kondisi miskin. Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin.

Tingginya angka kemiskinan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Persediaan makanan mereka sering kali tidak memadai, atau bahkan harus menderita kelaparan. Mereka tidak memiliki tempat tinggal, atau kalau pun ada, ukurannya begitu kecil dan dalam kondisi tidak layak. Banyak dari masyarakat tidak mengenyam pendidikan dan buta huruf. Kesehatan mereka juga tidak begitu baik atau bahkan buruk, namun tak bisa memeriksakan diri. Mereka umumnya menganggur, atau jika bekerja, pendapatan yang diperoleh sangatlah kecil. Sebagaimana kecenderungan yang terjadi pada negara-negara sedang berkembang, keberadaan mereka cenderung terkonsentrasi di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Salah satu fakta kemiskinan masih banyak ditemui salah satunya Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

Jumlah penduduk miskin yang tinggi di Kabupaten Banyuwangi menjadikan sebagai salah satu wilayah dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada urutan bawah di Propinsi Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2011) seperti Tabel 1.1

Tabel 1.1 Data IPM Jawa Timur Tahun 2009-2011

No	Nama Daerah	IPM			No	Nama Daerah	IPM		
		2009	2010	2011			2009	2010	2011
1	Kota Blitar	75,88	76,60	76,98	20	Kab. Nganjuk	69,25	69,73	70,27
2	Kota Surabaya	75,87	76,36	76,82	21	Kab. Ponorogo	68,55	69,07	69,75
3	Kota Malang	75,72	76,19	76,69	22	Kab. Madiun	68,24	68,63	69,28
4	Kota Mojokerto	75,66	76,11	76,43	23	Kab. Lamongan	67,88	68,33	69,03
5	Kota Madiun	75,42	75,89	76,23	24	Kab. Ngawi	67,52	68,02	68,41
6	Kab. Sidoarjo	74,87	75,35	75,88	25	Kab. Banyuwangi	67,24	67,80	68,36
7	Kota Kediri	74,45	75,11	75,68	26	Kab. Tuban	66,61	67,02	67,68
8	Kab. Gresik	73,00	73,49	73,98	27	Kab. Lumajang	66,20	66,65	67,26
9	Kota Batu	72,83	73,33	73,88	28	Kab. Malang	65,52	66,02	66,84
10	Kota Probolinggo	72,76	73,29	73,73	29	Kab. Pasuruan	65,52	66,02	66,84
11	Kab. Blitar	72,28	72,74	73,22	30	Kab. Bojonegoro	65,50	65,83	66,38
12	Kota Pasuruan	72,20	72,60	73,01	31	Kab. Sumenep	63,71	64,24	64,82
13	Kab. Mojokerto	71,99	72,51	72,93	<b>32</b>	<b>Kab. Banyuwangi</b>	<b>63,27</b>	<b>63,71</b>	<b>64,33</b>
14	Kab. Tulungagung	72,00	72,45	72,93	33	Kab. Bangkalan	62,97	63,40	64,00
15	Kab. Trenggalek	71,68	72,15	72,72	34	Kab. Pamekasan	62,49	63,13	63,81
16	Kab. Jombang	71,44	71,85	72,33	35	Kab. Situbondo	62,64	63,06	63,69
17	Kab. Magetan	71,20	71,79	72,32	36	Kab. Probolinggo	60,97	61,44	62,13
18	Kab. Pacitan	70,48	70,91	71,45	37	Kab. Bondowoso	60,76	61,26	62,11
19	Kab. Kediri	70,39	70,85	71,33	38	Kab. Sampang	56,99	57,66	58,68

Sumber data: BPS Jawa Timur, Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan data IPM untuk Kabupaten Banyuwangi berada di urutan tujuh dari bawah dan itu menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi dilihat dari kualitas dan kapabilitas manusia Indonesia yang meliputi tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, masih relatif tertinggal bila dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut menyiratkan bahwa kemiskinan masih merupakan fenomena yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, yang menyebutkan jumlah rumah tangga miskin tahun 2010 di Kabupaten Banyuwangi mencapai angka 370. 000

dan menjadikan Banyuwangi sebagai kabupaten dengan penduduk miskin terbesar di Propinsi Jawa Timur (Antara, 2010).

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai media info statistik pemerintah mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2011 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia (*release* data per Januari 2012). Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen (Media Info, 2012). Data dan persentase penduduk miskin sampai tahun September 2012 dijelaskan Tabel 2 berikut.

Tabel 1.2 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2011–Maret 2012

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perkotaan</b>					
Maret 2011	177.542	75.674	253.016	11,05	9,23
Maret 2012	187.194	30.213	267.408	10,65	8,78
<b>Perdesaan</b>					
Maret 2011	165.211	48.184	213.395	18,97	15,72
Maret 2012	177.521	51.705	229.226	18,48	15,12
<b>Kota+Desa</b>					
Maret 2011	171.834	51.906	233.740	30,02	12,49
Maret 2012	182.796	55.910	248.707	29,13	11,96

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2011 dan Maret 2012

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah dan persentase kemiskinan masih tergolong tinggi dan masih bisa rentang, serta jika tidak diatasi akan tetap tinggi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), dan berkurang 0,89 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta



orang (12,49 persen). Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih banyak dibanding penurunan penduduk miskin di daerah perkotaan. Selama periode Maret 2011–Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 399,5 ribu orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada periode Maret 2011–Maret 2012 sedikit mengalami perubahan. Pada bulan Maret 2011, 63,20 persen penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2012 persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan mencapai 63,45 persen (Susenas, 2012).

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat harus di atasi dengan melakukan pembangunan di segala aspek agar masyarakat dapat meningkat kesejahteraannya. Salah satunya adalah pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan di suatu negara. Todaro (1989:41) menjelaskan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih tidak bisa mengubah kondisi kemiskinan yang masih tinggi. Hal ini dikarenakan upaya mengentaskan kemiskinan hanya rakyat miskin sebagai objek hibah sehingga hanya menggantungkan kepada pemerintah dan tidak bersikap mandiri. Pengentasan kemiskinan menjadi pekerjaan yang harus dilakukan, dimana tujuan pengentasan kemiskinan yaitu untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan hidup bagi masyarakat miskin tersebut, dengan memandirikan usaha pada masyarakat. Kemiskinan dapat membuat permasalahan pada Negara, baik bentuk kriminalitas dan masalah lain seperti pengangguran dan lain-lain. Masalah kemiskinan harus dituntaskan secara mendasar, karena kemiskinan tersebut menyangkut tingkat kehidupan manusia, bukan hanya sekedar permainan angka relatif saja. Pemecahan masalah ini harus dilakukan secara multidisipliner oleh para ahli, karena masalahnya bersifat

multidimensional, yang penanggulangannya tidak dapat mengandalkan pada sistem mekanisme pasar. Kemiskinan akan menggegorogoti hasil pembangunan atau akan menjadi faktor penghambat/pembatas bagi pembangunan.

Penduduk miskin di Indonesia lebih banyak berada di wilayah perdesaan tentu paling berdampak bagi daerah-daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah perdesaan, karena daerah dengan kondisi demikian akan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Satu di antaranya adalah Kabupaten Banyuwangi. Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari jumlah rumah tangga miskin seperti pada Tabel 1.3 halaman 6.

Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi tetap menempatkan pengentasan kemiskinan pada prioritas utamanya dalam menghadapi kondisi kemiskinan. Selain itu, langkah ini juga sebagai bentuk dukungan untuk menyukseskan pembangunan nasional, yang sejak awal tahun 2000 mengadopsi konsep *Millenium Development Goals* (MDGs). Sebagaimana diketahui konsep terbaru pembangunan nasional tersebut menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai satu dari delapan tujuan yang hendak dicapainya pada tahun 2015. Delapan tujuan MDGs tersebut meliputi:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
  - 1) Mereduksi proporsi jumlah penduduk dengan konsumsi < US\$ 1 per hari
  - 2) Mereduksi proporsi jumlah penduduk yang menderita kelaparan
- b. Mewujudkan pendidikan dasar yang universal
- c. Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
- d. Mengurangi tingkat kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu hamil
- e. Memberantas HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
- f. Menjaga kelestarian lingkungan
- g. Mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan negara dan mengurangi kepunahan sumber daya alam
- h. Membangun kerjasama global untuk pembangunan, termasuk akses pasar
  - 1) Mengurangi tarif rata-rata untuk produk-produk pertanian
  - 2) Mengurangi subsidi pertanian domestik dan ekspor di negara-negara OECD (*United Nation Development Programe* dalam Ginting, 2009:7).



Tabel 1.3 Indeks IPM Seluruh Kecamatan Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Indeks-Kesehatan	Indeks Pendidikan	Indeks PPP	IPM
1	Pesanggaran	73,55	69,71	58,27	67,18
2	Siliragung	70,22	78,02	53,66	67,3
3	Bangorejo	72,63	77,2	63,45	71,1
4	Purwoharjo	72,23	80,56	62,06	71,62
5	Tegaldimo	70,82	77,98	63,53	70,77
6	Muncar	67,72	75,15	67,57	70,15
7	Cluring	75,27	73,89	65,84	71,67
8	Gambiran	74,83	78,57	67,27	73,56
9	Tegalsari	75,9	71,04	65,04	70,66
10	Glenmore	66,88	69,6	66,26	67,58
11	Kalibaru	73,97	69,5	56,78	66,75
12	Genteng	76,18	78,88	74,21	76,42
13	Srono	72,08	78,47	66,72	72,42
14	Rogojampi	66,98	72,82	72,47	70,76
15	Kabat	61,78	70,94	61,32	64,68
16	Singojuruh	72,02	70,46	58,35	66,94
17	Sempu	67,38	72,67	60,8	66,95
18	Songgon	72,83	67,19	61,13	67,05
<b>19</b>	<b>Glagah</b>	<b>75,8</b>	<b>66,04</b>	<b>64,56</b>	<b>81,8</b>
20	Licin	75,8	65,18	57,37	66,12
21	Banyuwangi	85,53	80,78	75,2	80,5
22	Giri	73,98	78,52	69,39	73,97
23	Kalipuro	62,53	77,81	66,4	68,92
24.	Wongsorejo	69,37	65,63	64	66,33

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 1.3 menjelaskan bahwa kecamatan yang paling tinggi IPMnya adalah Kecamatan Glagah sebesar 81,8 dimana pada Kecamatan Glagah terdapat beberapa desa *Osing* diantaranya Bakungan, Banjarsari, Glagah, Kampunganyar, Kemiren, Kenjo, Olehsari, Paspas, Rejosari dan Taman Suruh. *Osing* merupakan salah satu bagian sub-etnis Jawa. Dalam peta wilayah kebudayaan Jawa, *Osing* merupakan bagian wilayah *Sabrang Wetan*, yang berkembang di daerah ujung timur Pulau Jawa. Keberadaan komunitas *Osing* berkaitan erat dengan sejarah Blambangan. Orang-orang *Osing* adalah masyarakat Blambangan yang tersisa. Sebagai masyarakat yang memiliki keunikan berbeda maka masyarakat *Osing* merupakan salah satu aset Kabupaten Banyuwangi yang

perlu diperhatikan untuk tingkat kesejahteraannya.

Seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia, pengadopsian konsep MDGs membawa perubahan besar terhadap strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tidak dapat dihindari karena merupakan implikasi dari penekanan. Orientasi MDGs pada pembangunan manusia sebagai wujud konsep pembangunan yang berkualitas. Dengan berorientasi pada pembangunan manusia, maka strategi pengentasan kemiskinan yang digunakan adalah menempatkan masyarakat miskin sebagai aktor utama dalam pembangunan nasional, yang terlibat langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di wilayahnya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestarian.

Sebagaimana dikemukakan Gran dan Korten (dalam Surjono dan Nugroho, 2007:22), bahwa model pembangunan berpusat pada manusia memberi peran kepada individu bukan hanya sebagai subyek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang memengaruhi kehidupannya. Adapun tujuan utama melibatkan kaum miskin dalam pembangunan mereka sendiri adalah "...pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi-potensi manusia" (Korten dan Sjahrir, 1988:374).

Dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi MDGs pada pembangunan manusia, maka pembangunan di Kabupaten Banyuwangi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dibuktikan pada tujuan diadakannya otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

“mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan tujuan otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pembangunan daerah melalui otonomi daerah, dimana salah satunya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal (setempat) sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (*choices*) yang dapat dilakukan masyarakat.

Perkembangan pembangunan manusia Indonesia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal tahun 1970-an sampai lahir 1990-an, sedangkan untuk anggaran pengeluaran pemerintah sendiri, baik itu pengeluaran rutin maupun itu pengeluaran pembangunan (sekarang telah digabungkan) mulai diperhatikan dan dirasakan peningkatannya mulai tahun 1990-an, selama ini pemerintah hanya sibuk dalam mengurus pembangunan infrastruktur, pertumbuhan tersebut memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih banyak. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan *relative* sedikit, sedangkan investasi di Indonesia yang diharapkan sebagai modal untuk membuka lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat mengalami pasang surut akibat keadaan ekonomi dalam negeri yang tidak stabil (IHDR,2004).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **Analisis Kemiskinan Masyarakat *Osing* Di Kabupaten Banyuwangi.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi sebesar 25.726 KK atau dengan asumsi sekitar 102.904 jiwa (per KK terdiri dari 1 bapak, 1 ibu, dan 2 anak) yang tersebar di 24 kecamatan (Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2012). Berdasarkan 24 kecamatan, penulis memilih Kecamatan Glagah sebab dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi, tingkat kemiskinan masyarakat di Kecamatan Banyuwangi khususnya di Kelurahan Glagah ini masih relatif rendah dikarenakan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah Banyuwangi.

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah adalah “**Bagaimana Analisis Kemiskinan Masyarakat Osing Di Kabupaten Banyuwangi?**”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian, apapun yang diteliti dan siapapun yang meneliti pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian ini dimaksudkan supaya penulis mempunyai arah yang jelas dan tegas. Dalam Arikunto (2002:49) dijelaskan bahwa: “Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dilihat dari isinya sesuatu yang dicapai merupakan tujuan penelitian.”.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kemiskinan Masyarakat Osing di Kabupaten Banyuwangi.

### **1.4 Manfaat Penelitian.**

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan khususnya kajian Ilmu Ekonomi Pembangunan dan menjadi bahan dasar bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang sama dengan kajian yang lebih mendalam tentang masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Banyuwangi dalam pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin;

c. Manfaat peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan praktis penulis tentang masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang penanganannya membutuhkan keterkaitan berbagai pihak. Kemiskinan di Indonesia diiringi oleh masalah kesenjangan baik antargolongan penduduk maupun pembangunan antarwilayah, yang diantaranya ditunjukkan oleh buruknya kondisi pendidikan dan kesehatan serta rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli. Kemiskinan hanyalah sebagai salah satu masalah klasik yang selalu dihadapi oleh manusia, karena melibatkan seluruh aspek kehidupan, walaupun seringkali kehadirannya tidak disadari sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Menurut Chambers (dalam Suryawati, 2005:15) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005:17). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

- a. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- b. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha

memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

- c. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan (Suryawati, 2005:18).

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata. Menurut Nasikun (dalam Suryawati 2005:20), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:
- (1) *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
  - (2) *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena poal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor.
  - (3) *Population growth*, prespektif yang didasari oleh teori Malthus , bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deraet hitung.
  - (4) *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
  - (5) *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam.Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

- (6) *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- (7) *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- (8) *Exploatif inetrmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
- (9) *Inetrnal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- (10) *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Menurut Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan (Suryawati, 2005).

Tingkat kemiskinan daerah pedesaan:

- a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai



tukar beras per orang per tahun.

- c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Tingkat kemiskinan daerah perkotaan:

- a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria (Suryawati, 2005:26), yaitu:

- a) Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.
- b) Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

Menurut Tansey dan Ziegley (dalam Suharto, 2003:23), faktor kemiskinan terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam keluarga, seperti: (1) tingkat karakteristik usaha, termasuk didalamnya sumberdaya manusia, jenis usaha yang dilakukan, sumber modal dan pemasaran, (2) tingkat motivasi, terutama berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha, (3) tingkat dukungan anggota keluarga,

(4) pola produksi dan konsumsi keluarga. Faktor eksternal merupakan unsur-unsur penyebab yang berasal dari luar yang mempengaruhi keberdayaan keluarga miskin, yang meliputi: (1) perbedaan peluang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, (2) sempitnya mendapatkan peluang pekerjaan, (3) perbedaan aksesibilitas terhadap sumberdaya.

Berdasar pada penjelasan diatas, bahwa kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi termasuk kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat karena tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah kabupaten Banyuwangi mengadopsi konsep *Millenium Development Goals* (MDGs). Orientasi MDGs pada pembangunan manusia sebagai wujud konsep pembangunan yang berkualitas.

### 2.1.2 Pembangunan

#### a. Pengertian pembangunan

Menurut UNDP (1990:1), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia ("*a process of enlarging people's choices*"). Berdasarkan definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)". Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya

ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

b. Pembangunan yang berorientasi pada MDGs

Berdasar pada pengertian pembangunan diatas, maka dalam mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengadopsi konsep *Millenium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupa target bersama 184 negara. Sebagaimana diketahui konsep terbaru pembangunan nasional tersebut menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai satu dari delapan tujuan yang hendak dicapainya pada tahun 2015. Pengadopsian konsep MDGs membawa perubahan besar terhadap strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Orientasi MDGs pada pembangunan manusia sebagai wujud konsep pembangunan yang berkualitas.

Adapun ciri khas konsep pembangunan manusia dalam MDGs, yaitu: (1) menekankan pada pemerataan, artinya MDGs menuntut hak dasar warga negara dapat dipenuhi secara layak oleh negara, sehingga dapat mengangkat kesejahteraan penduduk atau membuktikan semakin luas penduduk yang dapat menikmati kesejahteraan sebagai hasil pembangunan; (2) karena semakin banyak penduduk yang meningkat kesejahterannya, maka pada gilirannya akan lebih banyak lagi sumber daya manusia yang dapat berkontribusi lebih luas dalam proses pembangunan; dan dengan demikian, (3) orientasi pembangunan manusia sesungguhnya diabdikan pada meningkatnya kapasitas warga negara untuk lebih produktif dalam mendorong pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan berbagai bentuk kesejahteraan (Wrihatnolo, 2007).

Oleh karena itu, Dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi MDGs pada pembangunan manusia, maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan otonomi daerah.

### 2.1.3 Otonomi Daerah

Reformasi telah membawa pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat/sentralisasi ke pemerintah daerah/desentralisasi dengan pemberian otonom



yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan (Widjaja, 2007:17).

Berkaitan dengan itu, dalam TAP MPR No. XV/MPR/1998 ditegaskan bahwa perlu penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi daerah secara formal telah dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001 dan otonomi daerah telah ikut mewarnai pada pengelolaan pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah pada UU Nomor 32 Tahun 2004 menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki



kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Serta dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Prinsip otonomi daerah pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tersebut, juga diterapkan oleh Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan, sebagai upaya mengurus rumah tangganya sendiri dan memberdayakan daerahnya, Kabupaten Banyuwangi mengadopsi MDGs (*Millenium Development Goals*) untuk mengentaskan kemiskinan. Bentuk pengadopsian MDGs ini, kabupaten Banyuwangi melaksanakan pemberdayaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi.

#### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks ini pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics dan sejak itu dipakai oleh Program Pembangunan PBB padalaporan HDI tahunannya. Digambarkan sebagai “pengukur vulgar” oleh Amarty Sen karena batasan indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitive dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita yang selamaini digunakan

dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. BPS Jawa Timur (2004) menyebutkan bahwa IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk usia 15 tahun ke atas (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lamanya sekolah (dengan bobot sepertiga); dan tingkat kehidupan layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan *Purchasing Power Parity* (PPP rupiah).

#### 1) Lamanya Hidup/ Angka Harapan Hidup

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global. Usia hidup diukur dengan indikator harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan  $e_0$ . Karena Indonesia tidak memiliki sistem vital registrasi yang baik maka  $e_0$  dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live-births*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan.

#### 2) Tingkat Pendidikan

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsure mendasar dari pembangunan manusia. Seperti halnya UNDP komponen IPM tingkat pendidikan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean-years of schooling*). Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, terhadap jumlah

penduduk usia 15 tahun atau lebih. Indikator ini diberi bobot dua pertiga. Bobot sepertiganya diberikan pada indikator rata-rata lamanya sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani.

### 3) Standar Hidup Layak (*Purchasing Power Parity* /PPP)

Standar hidup layak merupakan komponen ketiga selain dua komponen di atas yang juga diakui secara luas sebagai unsur dasar pembangunan manusia. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional UNDP memilih GDP (*Gross Domestic Product*) per kapita riil yang telah disesuaikan (*Adjusted Real GDP Per capita*) sebagai indikator hidup layak. Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur indeks pembangunan manusia. Walaupun demikian UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam penghitungan IPM. Dilemanya, memasukkan banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka GDP riil perkapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya.

Konsep pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya adalah pembangunan yang menurut konsep pembangunan manusia. Konsep pembangunan yang seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia seiring dengan pembangunan di bidang lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Mengingat manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan maka manusia di dalam kehidupannya harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya sebagai insan pembangunan.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995:12). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip secara berikut:

a. Produktivitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan social. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c. Kesinambungan



Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

d. Pemberdayaan

Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan, karenanya pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat bukan hanya untuk masyarakat.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia: Pengukuran Pencapaian Pembangunan

Pembangunan nasional menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kemudian dijabarkan ke dalam REPELITA adalah pembangunan yang menganut konsep pembangunan manusia. Konsep Pembangunan Manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu prinsip pembangunan manusia dijabarkan dalam TRILOGI pembangunan yang akan diimplementasikan dalam berbagai bentuk program pembangunan. Melalui strategi pemerataan, kebijaksanaan pembangunan mengarah pada pemilikan terhadap kelompok penduduk yang tertinggal. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk dan kesehatan dan program pembangunan dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar.

Jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal pembangunan jika penduduk tersebut berkualitas, namun akan menjadi beban pembangunan jika penduduk tersebut kurang kualitasnya. Untuk menciptakan pembangunan manusia yang berkualitas diharapkan pertama kali terlaksana dalam keluarga melalui penerapan keluarga kecil sejahtera. Program pengendalian jumlah penduduk



melalui program keluarga berencana diharapkan dapat mengendalikan jumlah penduduk, sehingga angka kelahiran dapat diturunkan. Dengan penurunan angka kelahiran dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian pembangunan bidang sosial sangat terlaksana dengan baik sesuai dengan konteks pembangunan manusia. Upaya membuat pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pelaksanaan pembangunan tentang dampak dari pelaksanaan pembangunan terhadap peningkatan kualitas manusia selaku penduduk dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran ideal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal walaupun belum dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan tersebut adalah umur yang panjang dan sehat, mengukur peluang hidup atau harapan hidup, berpengetahuan dan berkecakupan, serta akses terhadap sumber daya yang diutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

#### 2.1.6 Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

BPS menyebutkan tahapan penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

- 1) Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung Indeks masing-masing komponen IPM ( $e_0$ , Pengetahuan, dan Standard Hidup Layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut:

$$\text{Indeks } (I_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

$I_i$  = Indeks komponen IPM ke- $i$  ( $i=1,2,3$ )

$X_i$  = Nilai indikator komponen IPM ke  $i$

$X_{\max}$  = Nilai maksimum  $X_i$

$X_{\min}$  = Nilai minimum  $X_i$

- 2) Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing Indeks  $X_i$  dengan hubungan matematis;

$$\text{IPM} = 1/3 (X(1) + X(2) + X(3))$$

dimana:

- X(1) = Indeks Angka Harapan Hidup  
 X(2) =  $\frac{2}{3}$  (Indeks Melek Huruf) +  $\frac{1}{3}$  (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)  
 X(3) = Indeks Konsumen Per Kapita yang disesuaikan

Tabel 2.1 Batas Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indeks Komponen IPM (Xi)	Nilai Indikator		Catatan
	Maksimum	Minimum	
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
Daya Beli	737,200	300,000	UNDP menggunakan PDB/Kapita riil yang disesuaikan

Sumber: BPS, Laporan Pembangunan Manusia dalam BPS Jawa Timur (2004)

### 3) Penentuan Status IPM

BPS Jawa Timur (2004) menyebutkan bahwa UNDP membagi status kabupaten/kota ke dalam empat kategori dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria IPM

Tingkatan Status	Kriteria
Rendah	$IPM < 50$
Menengah Bawah	$50 \leq IPM < 66$
Menengah Atas	$66 \leq IPM < 80$
Tinggi	$IPM \geq 80$

Sumber: BPS, Laporan Pembangunan Manusia dalam BPS Jawa Timur (2004)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Ramirez (1998), meneliti hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan positif akurat pada kedua jalur hubungan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Ditambahkan pula bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor publik dan pendidikan penting artinya dalam memperkuat hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia, sementara tingkat investasi dan distribusi pendapatan memperkuat hubungan antara pertumbuhan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini akan mengkonfirmasi bahwa modal manusia (*human capital*) dalam bentuk pendidikan maupun kesehatan mempunyai kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi.

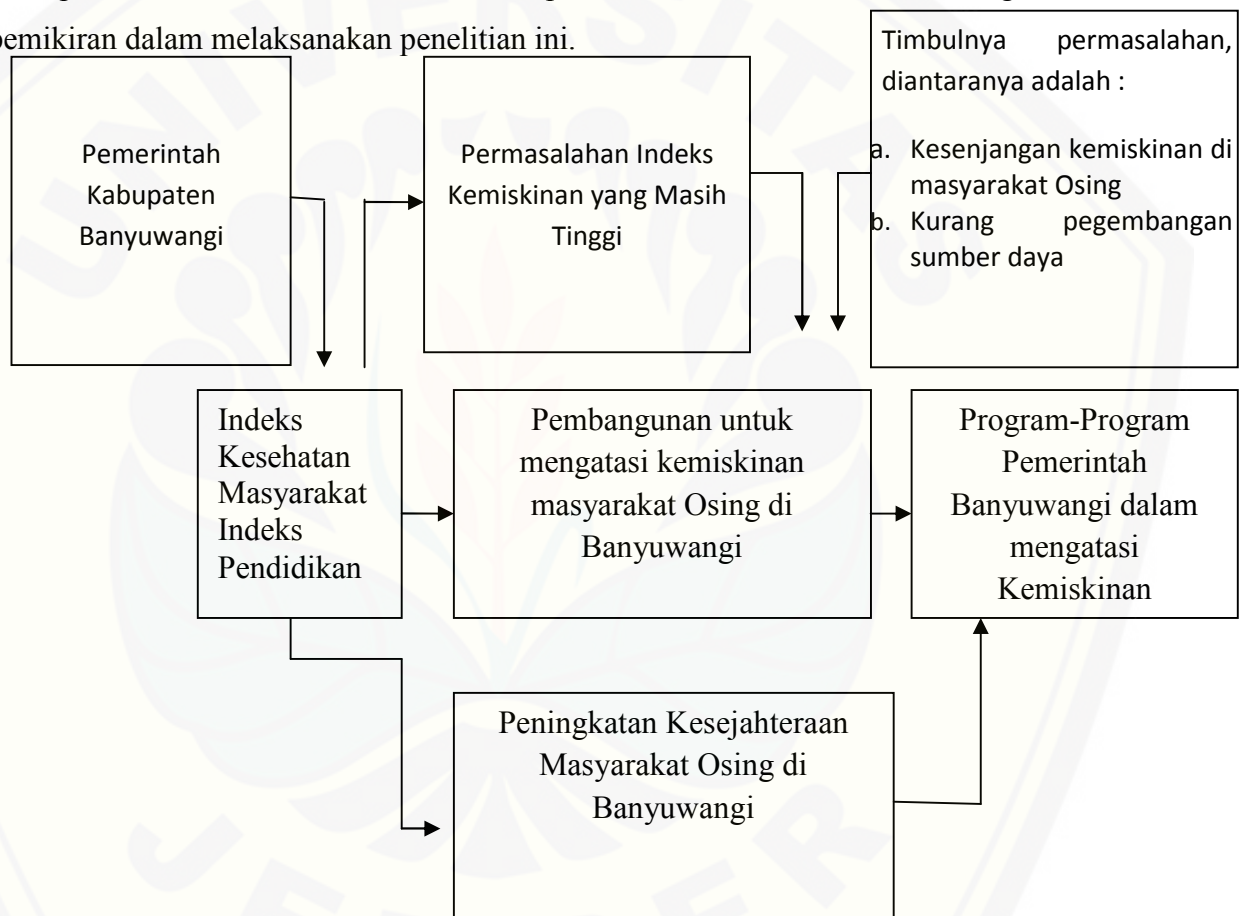
Gundi (2004), meneliti hubungan timbal balik antara pembangunan manusia dan kinerja Daerah Tingkat II di Indonesia yang salah satu determinan penting dalam pertumbuhan ekonominya adalah sumber daya manusia atau modal manusia. Di sisi lain pembangunan manusia membutuhkan sumber daya lain, seperti untuk pembiayaan yang mana bersumber dari pembangunan ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebetulnya terdapat hubungan dua arah.

Sembiring (2009) melakukan penelitian yang bertujuan melihat pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemeliharaan dalam realisasi anggaran pemerintahan kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Utara. Reformasi anggaran dalam konteks otonomi memberikan paradigma baru terhadap anggaran daerah yaitu bahwa anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. Variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja modal dan pendapatan asli daerah sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah belanja pemeliharaan. Data dalam penelitian ini merupakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dan Bappeda Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 15 kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemeliharaan. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa

belanja modal dan pendapatan asli daerah secara individu berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan, namun belanja modal memiliki pengaruh yang paling besar terhadap belanja pemeliharaan pada kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Utara.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini akan terarah sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diterapkan serta berdasarkan teoritis, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitas menunjuk segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah. Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2005:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Misalnya perilaku informan, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik di masyarakat Osing dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Karena menggunakan metode penelitian kualitatif, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-positivist*, khususnya *critical theory*.

Begitu juga dengan metode dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, karena metode tersebut dibutuhkan sesuai dengan tema yang akan dibahas untuk memilih informan maka membutuhkan metode tersebut dalam pengumpulan data agar lebih valid.

Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong (2005: 4) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin melalui ketrampilan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.



a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama (responden) yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006:60). Data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data ini dapat diperoleh dari artikel, internet, dan dokumentasi (Sekaran, 2006:60).

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat *Osing* di Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Glagah khususnya desa Kemiren, Oleh Sari dan Taman Suruh.

### 3.4 Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek dan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2008: 50). Dengan demikian pemilihan informan tidak berdasarkan kuantitas, tetapi kualitas dari informan terhadap masalah yang akan diteliti.

Dalam pelaksanaan di lapangan guna pengumpulan data, pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti di dalam memperoleh data. Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sampel sumber data (Sugiyono, 2008:57).

Informan yang dipilih antara lain serta masyarakat *Osing* di Kecamatan Glagah khususnya desa Kemiren, Oleh Sari dan Taman Suruh, Dinas Kesejahteraan Sosial.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono, 2008: 137-138). Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahaman yang tidak mungkin dilakukan dengan teknik survai.

Wawancara bisa mengambil beberapa bentuk, yang paling umum, wawancara studi kasus bertipe *open-ended*, dimana peneliti dapat bertanya kepada informan kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai suatu peristiwa. Pada beberapa situasi peneliti bahkan bisa meminta informan untuk menyetujui pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya. Tipe wawancara yang kedua adalah wawancara yang terfokus, dimana informan diwawancarai dalam waktu yang pendek. Dalam kasus ini, wawancara tersebut bisa tetap *open-ended* dan mengasumsikan cara percakapan namun pewawancara tidak perlu mengikuti serangkaian pertanyaan tertentu yang diturunkan dari protokol studi kasusnya. Tipe wawancara yang ketiga memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur, sejalan dengan survai (Yin, 2002: 108-110).

#### **3.5.2. Observasi**

Sugiyono (2008: 145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis

dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamatai terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur (Sugiyono 2008: 145). Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menggunakan metode *non participant observation*, kemudian untuk memudahkan pengumpulan data maka peneliti memilih instrumen observasi secara terstruktur agar mempermudah dalam penyusunan sub-sub penelitian guna menunjang laporan hasil penelitian.

### 3.5.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian sesuai dengan teori yang ada agar penelitian berjalan dengan konsteksnya. Pada penelitian kali ini penulis banyak sekali menggunakan literatur yang didapat dari buku bacaan serta data dari media massa maupun internet.

### 3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian dilakukan pengecekan keabsahan data melalui :

#### a. Kredibilitas

Ada beberapa cara meningkatkan kredibilitas data (kepercayaan) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan

ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, member chek.

Sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila peneliti datang sekali ke lapangan. Sehingga peneliti harus memperpanjang pengamatan nantinya akan memperoleh link dn *chemistry*. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dengan meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka akan diperoleh kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis. Triangulasi yaitu pengecekan terkadang informan keliru dengan kata-kata sehingga tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Kasus negatif adalah kasus ganjil yang ditemukan saat penggalian data dan kasus tersebut bertentangan dengan data yang lainnya serta dapat menjadi kunci kejagan data sebelumnya atau yang lainnya. Dengan analisis kasus negatif peneliti menelusuri lebih lanjut data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Penelitian bisa dilakukan melalui tim, peneliti dapat mendiskusikan hasil temuan sementara dengan teman sejawat peneliti. Member chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuan untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh pemberi data. Apabila para pemberi data sudah sepakat data yang diberikan berarti data valid, sehingga semakin kredibel. Akan tetapi menjadi sebaliknya yaitu tidak valid dan kredibel apabila para pemberi data meragukan data dan peneliti tidak melakukan diskusi lebih lanjut dengan informan.

b. Konfirmabilitas

Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji konfirmabilitas hampir sama dengan uji dependabilitas, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dalam



penelitian harus ada proses, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.

c. Transperabilitas

Transperabilitas berkenaan dengan hasil penelitian, hingga manakah hasil penelitian ini dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk mendapatkan derajat transperabilitas yang tinggi tergantung pada kemampuan peneliti mengangkat makna-makna esensial temuan penelitiannya dan melakukan refleksi dan analisis kritis yang ditunjukkan dalam pembahasan penelitian. Bila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian yang dilakukan, maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transperabilitas.

Berbagai uraian yang dikemukakan di atas penelitian merupakan sebuah proses yang memerlukan perhatian yang benar-benar serius seandainya ingin diperoleh hasil penelitian yang berkualitas.

### 3.7 Validitas Data

#### 3.7.1. Triangulasi

Informasi yang diperoleh harus memenuhi syarat objektivitas sehingga peneliti harus melakukan triangulasi dalam mendapatkan/menggali informasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Praktik triangulasi tergambar dari kegiatan peneliti yang bertanya pada informan A dan mengklarifikasinya dengan informan B serta mengeksplorasikannya pada informan C. Misalnya wawancara dengan masyarakat soing tentang indeks IPM sehingga diperoleh data yang relative sama atau tidak ada lagi data/informasi yang diperoleh.

Suatu informasi yang akan dijadikan data penelitian perlu diperiksa validitasnya sehingga data tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang



dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan Triangulasi. Sehingga ada triangulasi dari sumber/informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

### 3.7.2. Triangulasi Sumber

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber. Contohnya menguji kredibilitas data, maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan pada masyarakat, dan dinas koperasi Kabupaten Banyuwangi. Data sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber tersebut.

## 3.8 Metode Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “*Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*”

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Sugiyono, 2008: 88).

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa katifitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

### 3.8.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Sehingga reduksi data memerlukan proses berfikir sensitif dan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2008: 247-249).

### 3.8.2 Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya serta penyajian data dalam penelitian adalah dengan sistematis melalui gambaran atau skema. Penyajian data dapat diartikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan Ibu kotanya Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, dan terletak pada  $113^{\circ} 53'$ –  $114^{\circ} 38'$  Bujur Timur serta  $7^{\circ} 43'$ –  $8^{\circ} 46'$  Lintang Selatan. Ibukota Kabupaten Banyuwangi berjarak 239 km sebelah timur Surabaya. Banyuwangi merupakan ujung paling timur jalur pantura, serta stasiun paling timur jalur kereta api di Pulau Jawa. Selain itu terdapat juga Pelabuhan Ketapang yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan kapal ferry.

Kabupaten Banyuwangi dapat dicapai dari dua jalur darat, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara merupakan bagian dari jalur pantura yang membentang dari ujung kulon hingga pelabuhan ketapang dan jalur selatan merupakan pecahan dari jalur pantura dari Kabupaten Pasuruan melewati Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember.

Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember;
- d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 24 kecamatan yang meliputi : Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Siliragung, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Muncar, Kecamatan Cluring, Kecamatan Gambiran, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Genteng, Kecamatan Srono, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Kabat, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Sempu, Kecamatan Songgon, Kecamatan Glagah, Kecamatan Licin, Kecamatan

Banyuwangi, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro dan Kecamatan Wongsorejo.

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012 menurut data Badan Pusat Statistik sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk : 1.580.441 jiwa;
- b. jumlah penduduk Laki-Laki : 772.966 jiwa;
- c. jumlah penduduk Perempuan : 807.475 jiwa;
- d. kepadatan Penduduk : 273 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

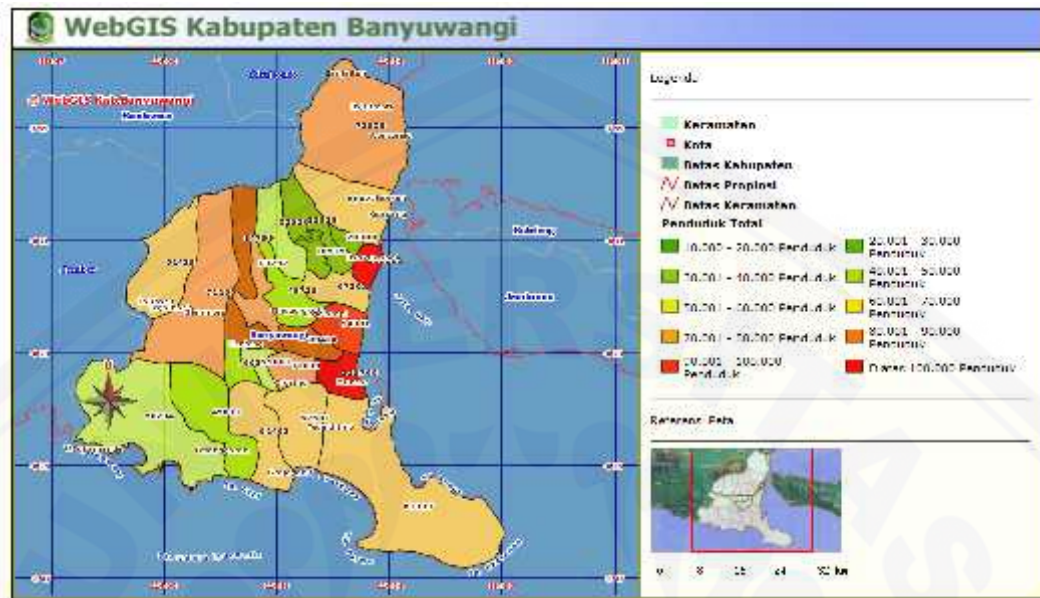
Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012, diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan ternyata lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-lakinya. Secara umum struktur perekonomian yang ada di Kabupaten Banyuwangi terdiri atas beberapa sektor mata pencaharian penduduk yaitu meliputi pertanian, industri, perdagangan, keuangan, jasa, pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air minum, angkutan dan komunikasi, konstruksi dan lain-lain.

Penduduk Banyuwangi cukup beragam dengan mayoritas adalah Suku Osing. Namun, terdapat suku Madura (kecamatan Wongsorejo, Bajulmati, Glenmore dan Kalibaru) dan suku Jawa dengan jumlah yang cukup signifikan, serta terdapat minoritas suku Bali dan suku Bugis. Suku Osing merupakan penduduk asli kabupaten Banyuwangi dan bisa dianggap sebagai sebuah sub-suku dari suku Jawa. Bahasa dan budaya suku Osing banyak dipengaruhi oleh bahasa dan budaya Bali. Mereka menggunakan bahasa Osing yang dikenal sebagai salah satu ragam tertua bahasa Jawa. Kesenian asal Banyuwangi adalah kuntulan, gandrung, jaranan, barong, janger dan seblang. Suku Osing Banyak mendiami di Kecamatan Rogojampi, Songgon, Kabat, Glagah, Giri, Kalipuro, Kota serta sebagian kecil di kecamatan lain.

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,52 km<sup>2</sup> yang didiami oleh 1.554.997 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 269 orang per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Banyuwangi yakni sebanyak 3.522 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling rendah adalah



Kecamatan Tegaldlimo yakni sebanyak 46 orang per km<sup>2</sup>. Persebaran penduduk Banyuwangi dijelaskan Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Persebaran Penduduk Banyuwangi

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah 99, yang artinya jumlah penduduk perempuan 1 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, atau setiap 100 perempuan terdapat 99 laki-laki. Rasio jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Giri yaitu sebesar 104 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Glagah yakni sebesar 95. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyuwangi per tahun selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2004-2014 adalah sebesar 0,44 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Kalipuro adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi yakni sebesar 1,72 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Singojuruh yakni sebesar -0,17 persen. Kecamatan Muncar menempati urutan pertama dari jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,46 persen.



Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000, 2010 dan 2012

Kode	Kecamatan	2000	2010	2012	2000-2010	2010-2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010	Pesanggaran	90.316	48.412	48.870	0,27*	0,95
011	Siliragung	-	44.390	44.820	0	0,97
020	Bangorejo	57.899	59.442	60.027	0,26	0,98
030	Purwoharjo	63.589	64.969	65.628	0,21	1,01
040	Tegaldlimo	59.472	61.176	61.674	0,28	0,81
050	Muncar	122.238	128.924	129.737	0,53	0,63
060	Cluring	67.871	70.049	70.771	0,32	1,03
070	Gambiran	100.347	58.412	58.930	0,41*	0,89
071	Tegalsari	-	46.161	46.532	0	0,80
080	Glenmore	67.117	69.471	70.093	0,35	0,90
090	Kalibaru	57.830	61.181	61.737	0,56	0,91
100	Genteng	79.895	83.124	83.874	0,4	0,90
110	Srono	84.217	87.209	87.942	0,35	0,84
120	Rogojampi	88.791	92.358	93.173	0,39	0,88
130	Kabat	63.501	67.137	67.546	0,56	0,61
140	Singojuruh	45.890	45.242	45.663	-0,14	0,93
150	Sempu	69.543	71.281	71.994	0,25	1,00
160	Songgon	49.857	50.275	50.714	0,08	0,87
170	Glagah	58.708	33.992	34.323	0,53*	0,97
171	Licin	-	27.878	28.043	0	0,59
180	Banyuwangi	101.813	106.000	106.797	0,4	0,75
190	Giri	26.743	28.510	28.693	0,64	0,64
200	Kalipuro	64.451	76.179	76.566	1,69	0,51
210	Wongsorejo	68.703	74.306	74.751	0,79	0,60
	Banyuwangi	1.488.791	1.556.078	1.568.898	0,22	

Sumber : Proyeksi Sensus penduduk (Source: Projection of Population Census)

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan laju pertumbuhan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000, 2010 dan 2012 menunjukkan pertumbuhan penduduk Banyuwangi. Kemudian penduduk dilihat dari sex ratio dijelaskan Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan sex ratio

	Age Group		Laki-laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
	(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
0	-	4	64.502	61.471	125.973
5	-	9	61.286	58.790	120.076
10	-	14	65.617	62.253	127.870
15	-	19	63.758	60.395	124.153
20	-	24	52.774	52.085	104.859
25	-	29	53.745	54.835	108.580
30	-	34	58.294	60.091	118.385
35	-	39	60.661	62.156	122.817
40	-	44	61.679	63.531	125.210
45	-	49	56.662	59.054	115.716
50	-	54	48.779	50.106	98.885
55	-	59	41.142	40.136	81.278
60	-	64	32.952	33.198	66.150
65	-	69	23.846	26.351	50.197
70	-	74	16.480	20.247	36.727
		75+	16.729	25.293	42.022
Jumlah/Total			778.906	789.992	1.568.898

*Sumber : Proyeksi Sensus penduduk (Source: Projection of Population Census)*

Kebutuhan hidup yang paling penting bagi setiap orang berupa pendidikan, kesehatan dan ke- mampuan untuk memenuhi kebu- tuhan hidupnya dengan baik. Apa bila ketiga kebutuhan yang dimak- sud dapat terpenuhi, maka dapat terwujud kesejahteraan bagi masya- rakat yang ditandai dengan mening- katnya kualitas sumberdaya manu- sia, hidup sehat berumur panjang serta meningkatnya pendapatan dan juga daya beli masyarakat itu sendiri. Program pendidikan dasar atau sering disebut dengan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, secara kelembagaan di Kabupaten Banyuwangi dapat dikategorikan memadai, karena seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi sudah mempunyai SD &SLTP. Bahkan minimal ada satu SLTP berstatus negeri. Termasuk salah satunya Ke- camatan Licin sebagai akibat dari pemekaran kecamatan baru. SLTP yang ada tidak ikut Kecamatan Glagah sebagai kecamatan induk/lama.

Berlanjut ke jenjang pend- dikan setingkat lebih tinggi yang disebut Sekolah Menengah. Lembaga SMU. Umumnya daerah bagian barat di Kabupaten Banyuwangi masih belum kebagian wilayahnya mendapat lembaga SMU, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Gambaran umum selain pendidikan yang berhubungan dengan aspek sosial diantaranya adalah ke harmonisan rumah-tangga. Pada ta hun 2011 yang tercatat sebanyak 1.173 cerai dan 670 talak. Angka ini mengalami kenaikan dari

tahun 2011. Sedangkan pernikahan yang tercatat di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi berjumlah 16.479. Selain angka perceraian yang meningkat, informasi lain yang didapat dari Kementerian Agama adalah berkurangnya jumlah jamaah haji pada tahun 2012 dari 1.215 jamaah pada tahun 2011 menjadi 883 jamaah pada tahun 2012. Guna mengendalikan angka pertumbuhan penduduk, hingga saat ini pemerintah masih melestarikan program Keluarga Berencana. Selama tiga tahun terakhir, pemerintah kabupaten selalu meningkat-kan target peserta KB baru. Peserta KB yang ditargetkan pada tahun 2012 adalah sejumlah 233.392 orang, namun pada realisasinya, peserta pada tahun 2012 mencapai 267.363 orang (114,6 persen).

#### 4.1.2 Gambaran Umum Suku Osing Bayuwangi

Suku Osing merupakan penduduk asli Banyuwangi, atau yang biasa juga disebut dengan “wong Blambangan”, Suku Osing terletak di Jawa Timur dan kurang lebih menempati separuh dari wilayah Banyuwangi. Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur di Indonesia.

Kabupaten ini terletak di wilayah ujung paling timur pulau Jawa. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Situbondo. Sebelah timur berbatasan dengan selat Bali. Sebelah selatan berbatasan dengan samudra Hindia. Dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Jember dan kabupaten Bondowoso. Pelabuhan Ketapang menghubungkan pulau Jawa dengan pelabuhan Gilimanuk di Bali.

Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi yang masih memiliki budaya asli suku Osing yakni di desa Kemiren, kecamatan Glagah, dan kabupaten Banyuwangi. Sejarah Suku Osing diawali pada akhir masa kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1478 M. Perang saudara dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam terutama Kesultanan Malaka mempercepat jatuhnya Majapahit. Setelah kejatuhannya, orang-orang majapahit mengungsi ke beberapa tempat, yaitu lereng Gunung Bromo (Suku Tengger), Blambangan (Suku Osing) dan Bali. Kedekatan sejarah ini terlihat dari corak kehidupan Suku Osing yang masih menyiratkan budaya Majapahit. Kerajaan Blambangan, yang didirikan oleh masyarakat osing, adalah kerajaan terakhir

yang bercorak Hindu. Kata "Osing" dalam bahasa Osing sendiri bisa diartikan "tidak", sehingga ada anekdot yang mengisahkan tentang keberadaan orang Osing itu sendiri, ketika orang asing bertanya kepada orang banyuwangi bahwa kalian orang Bali atau orang Jawa? mereka menjawab dengan kata "Osing" yang artinya tidak keduanya (Muarif, 2015)

Dalam sejarahnya Kerajaan Mataram Islam tidak pernah menancapkan kekuasaannya atas Kerajaan Blambangan, hal inilah yang menyebabkan kebudayaan masyarakat Osing mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Suku Jawa. Suku Osing mempunyai kedekatan yang cukup besar dengan masyarakat Bali, hal ini sangat terlihat dari kesenian tradisional Gandrung yang mempunyai kemiripan, dan mempunyai sejarah sendiri-sendiri.

Kemiripan lain tercermin dari arsitektur bangunan antar Suku Osing dan Suku Bali yang mempunyai banyak persamaan, terutama pada hiasan di bagian atap bangunan. Osing juga merupakan salah satu komunitas etnis yang berada di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Dalam lingkup lebih luas. Dalam peta wilayah kebudayaan Jawa, Osing merupakan bagian wilayah Sabrang Wetan, yang berkembang di daerah ujung timur pulau Jawa. Keberadaan komunitas Osing berkaitan erat dengan sejarah Blambangan. Keturunan kerajaan Hindu Blambangan ini berbeda dari masyarakat lainnya (Jawa, Madura dan Bali), bila dilihat dari adat-istiadat, budaya maupun bahasanya. Sebagai kelompok budaya yang keberadaannya tidak ingin dicampuri budaya lain.

Puputan adalah perang terakhir hingga darah penghabisan sebagai usaha terakhir mempertahankan diri terhadap serangan musuh yang lebih besar dan kuat. Tradisi ini pernah menyulut peperangan besar yang disebut Puputan Bayu pada tahun 1771 M. Sejarah Perang Bayu ini jarang di ekspos oleh media sehingga sejarah ini seperti tenggelam.

Dalam perkembangan berikutnya, setelah para petinggi Majapahit berhasil hijrah ke Bali dan membangun kerajaan di sana, Blambangan, secara politik dan kultural, menjadi bagian dari Bali atau, seperti yang diistilahkan oleh beberapa sejarawan, "di bawah perlindungan Bali". Tetapi, pada tahun 1639, kerajaan Mataram di Jawa Tengah juga ingin menaklukkan Blambangan yang meskipun



mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Bali menelan banyak korban jiwa; rakyat Blambangan tidak sedikit yang terbunuh dan dibuang.

Blambangan tampak relatif kurang memperlihatkan kekuatannya, di masa penjajahan Belanda, ia justru menampilkan kegigihannya melawan dominasi VOC. Perang demi perang terjadi antara rakyat Blambangan melawan kolonial Belanda. Hingga akhirnya memuncak pada perang besar pada tahun 1771-1772 di bawah pimpinan Mas Rempeg atau Pangeran agapati yang dikenal dengan perang Puputan Bayu.(Arif, 2015)

Perang ini telah berhasil memporak-porandakan rakyat Blambangan dan hanya menyisakan sekitar 8.000 orang. Meski demikian, tampaknya rakyat Blambangan tetap pantang menyerah. Perang-perang perlawanan, meski lebih kecil, terus terjadi sampai berpuluh tahun kemudian (1810) yang dipimpin oleh pasukan Bayu yang tersisa, yaitu orang-orang yang oleh Belanda dijuluki sebagai “orang-orang Bayu yang liar”.

Setelah dapat menghancurkan benteng Bayu, Belanda memusatkan pemerintahannya di Banyuwangi dan mengangkat Mas Alit sebagai bupati pertama Banyuwangi. Blambangan memang tidak pernah lepas dari pendudukan dan penjajahan pihak luar, dan pada tahun 1765 tidak kurang dari 60.000 pejuang Blambangan terbunuh atau hilang untuk mempertahankan wilayahnya. Pendudukan dan penaklukan yang bertubi-tubi itu ternyata justru membuat rakyat Blambangan semakin patriotik dan mempunyai semangat resistensi yang sangat kuat.

Orang Blambangan sangat keras dan tegas, hal ini didasarkan pada Sejarah Blambangan yang sangat menyedihkan. Suku Blambangan terus berkurang karena terbunuh oleh kekuatan-kekuatan yang berturut-turut melanda daerah tersebut, seperti kekuatan Mataram, Bali, Bugis dan Makassar, para perampok Cina, dan akhirnya VOC. Tetapi semangat rakyat Blambangan tidak pernah sama sekali padam, dan keturunannya yang ada sekarang merupakan suku bangsa yang gagah fisiknya dan kepribadian serta berkembang dengan pesat, berpegang teguh pada adat-istiadat, tetapi juga mudah menerima peradaban baru. Rakyat Blambangan, seperti yang digambarkan diatas itulah sebagai cikal-



bakal wong Osing atau sisa-sisa wong Blambangan.

Sejarah dan asal-usul suku Osing Banyuwangi yang juga dikenal dengan sebutan “Wong Blambangan”, kini suku Osing telah tersebar kebeberapa daerah atau kecamatan di Banyuwangi, diantaranya adalah kecamatan Kemiren, Banyuwangi, Glagah, Rogojampi. Dan untuk melestarikan budaya, adat istiadat suku Osing, maka pemerintah daerah Banyuwangi menetapkan desa Kemiren sebagai desa Suku Osing untuk menjaga dan melestarikan budaya dan adat suku Osing.

Dalam bahasa Osing, kata „Osing“ (dibaca Using) itu sendiri berarti „tidak“, dan kata „Osing“ ini mewakili keberadaan orang Osing yang ada di Banyuwangi. Jika orang Osing ini ditanya mengenai asalnya, kalian orang Bali atau Orang Jawa? maka orang Osing ini akan menjawab „Osing“ yang berarti mereka tidak berasal dari Jawa ataupun Bali. Suku Osing biasa disebut *Wong Osing*, *Lare Osing*, dan *Tiyang Osing* yang berarti saya orang Osing.

Secara geografis, suku Osing mendiami daerah dalam Kabupaten Banyuwangi. Walaupun kehadiran suku-suku lain yang ada di Banyuwangi seperti Jawa, Madura, dan Bugis, tidak merubah pandangan umum termasuk orang Osing sendiri bahwa yang disebut sebagai masyarakat Banyuwangi ialah masyarakat Osing. Menurut Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Setiyo Puguh, di Kabupaten Banyuwangi masyarakat Using tersebar di beberapa kecamatan seperti Glagah, Giri, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring, dan Genteng.

#### 4.1.3 Deskripsi IPM Banyuwangi

Kemiskinan di kabupaten Banyuwangi masih merupakan permasalahan yang harus di atasi oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan taraf kemiskinan masih tergolong tinggi seperti tambap pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan ( P1 ), Indeks Kedalaman Kemiskinan ( P2 ), 2010-2013

Kemiskinan	2010	2011	2012	2013
-1	-2	-3	-4	-5
Garis Kemiskinan ( GK), (Rupiah/Kapita)	220031.00	240315.00	257857.00	276648.00
Jumlah Penduduk dibawah GK ( 000 jiwa )	175.10	164.00	156.60	151.60
Prosentase Penduduk Miskin ( P0 )	11.25	10.47	9.94	9.57
Indeks Kedalaman Kemiskinan ( P1 )	1.64	1.30	1.31	1.54
Indeks Keparahan Kemiskinan ( P2 )	0.37	0.27	0.28	0.37

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2014

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabuputaen Banyuwangi Tahun 2014 mencapai 68,24 atau naik 0,44 dibanding dengan tahun 2013 yang sebesar 67,80. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya Indeks Pendidikan sebesar 0,43 atau dari 72,48 di tahun 2013 menjadi 72,91 di tahun 2014, Indeks Kesehatan naik 0,08 atau dari 69,64 di tahun 2013 menjadi 69,72 di tahun 2014 dan Indeks Daya Beli naik sebesar 0,82 atau dari 61,37 di tahun 2013 menjadi 62,09 di tahun 2014.

Apabila IPM Kabupaten Banyuwangi ini dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Timur, angkanya selalu berada di bawah angka Jawa Timur dengan urutan ke 26. Ini merupakan urutan yang relatif tertinggal karena menempati di tiga perempat bagian terbawah. Artinya jalan untuk menuju sasaran ideal yang berupa pembangunan manusia seutuhnya yang ditandai dengan kualitas sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Banyuwangi untuk bisa segera terwujud masih membutuhkan waktu yang relatif lama.

Berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf diperoleh bahwa Kecamatan Glagah, Bangorejo dan Benculuk merupakan wilayah yang paling tertinggal pendidikannya. Sedang wilayah yang paling berhasil di bidang pendidikan berada di Wilayah Kecamatan Glagah Banyuwangi dan Genteng. Kinerja di bidang kesehatan. Berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) di

masing-masing wilayah Kecamatan Glagah, diperoleh bahwa keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan tercapai di Kecamatan Glagah, Banyuwangi dan Genteng serta sebaliknya ketertinggalan pembangunan di bidang kesehatan terjadi di Wilayah Kecamatan Glagah Bangorejo dan Benculuk. Kinerja di bidang daya beli. Secara umum daya beli penduduk Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2013 hingga 2014 menjadi lebih baik meskipun masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi Jawa Timur. Apabila setiap tahunnya selalu menunjukkan pola yang menurun, tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Banyuwangi akan semakin tertinggal bila dibandingkan dengan kemampuan daya beli rata-rata penduduk Provinsi Jawa Timur

#### 4.1.4. Analisis Kemiskinan Masyarakat Osing di Banyuwangi

##### a. Analisis Kemiskinan diukur Indeks Pembangunan Manusia

Analisis Kemiskinan diukur Indeks Pembangunan Manusia pada masyarakat Osing di Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Osing yang dijelaskan dengan indikator-indikator IPM antara lain tingkat pendidikan, melek huruf, kesehatan dan daya beli seperti dijelaskan berikut.

##### 1. Indikator Pendidikan

Ada tiga variabel di dalam indikator pendidikan yang kerap kali digunakan oleh para pemerhati ketika mengkaji keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan. ketiga variabel itu terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), kemampuan baca tulis atau angka melek huruf dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dengan dipilihnya ketiga variabel ini bukan berarti variabel pendidikan yang lain menjadi kurang maknanya, akan tetapi dengan alasan bahwa ketiga variabel ini sudah cukup representatif untuk mengukur berhasil atau tidaknya program pembangunan di bidang pendidikan.

APS dalam prakteknya dibedakan menurut tiga kelompok umur. Pertama kelompok umur usia Sekolah Dasar (SD) sederajat yaitu umur 7 – 12 tahun. Kedua pada kelompok umur Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yaitu 13 – 15

tahun dan ketiga pada kelompok umur Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yaitu 16 – 18 tahun. Arti dari angka APS menggambarkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan. Indikasi dari angka APS ini apabila semakin tinggi angkanya maka semakin berhasil program pendidikan yang diselenggarakan. Besarnya angka APS maksimal 100 persen yang mempunyai arti bahwa seluruh anak pada kelompok umur tertentu semuanya sedang bersekolah.

Angka APS pada umumnya mempunyai ciri semakin tinggi kelompok umur yang diukur, akan semakin rendah angka APS pada kelompok umur tersebut. Keadaan yang demikian ini menandakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat masih rendah, karena kemampuan untuk membiayai sekolah pada jenjang yang lebih tinggi semakin tidak mampu. Atau sebagai akibat dari semakin tingginya biaya pendidikan yang terjadi dari jenjang ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada akhirnya putus sekolah menjadi pilihan. Hal ini terbukti dari angka putus sekolah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 APS dan Angka Putus Sekolah Kecamatan Glagah Tahun 2014

No.	Jenjang Sekolah Sederajat	Usia Sekolah		
		7 – 12	13 – 15	16 – 18
1.	Tdk/blm pernah sekolah	0,67 %		
	Tidak sekolah lagi	0,34 %		
2.	Tdk/blm pernah sekolah		2,00 %	
	Tidak sekolah lagi		11,14 %	
3.	Tdk/blm pernah sekolah			0,01 %
	Tidak sekolah lagi			40,24 %
Angka Putus Sekolah Kecamatan Glagah		0,34 %	11,14 %	40,24 %

Sumber: BPS Kecamatan Glagah

Pada tahun 2014 angka APS untuk kelompok umur 7 – 12 tahun sebesar 98,99 persen. Artinya dari setiap 100 anak yang berumur 7 – 12 tahun yang ada di Kecamatan Glagah 1 hingga 2 anak di antaranya akan ditemukan tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi (*Drop Out*). Kelompok umur 13 – 15



tahun dengan angka APS sebesar 86,86 persen. Artinya dari setiap 100 anak yang berumur 13 – 15 tahun yang ada di Kecamatan Glagah 3 hingga 4 anak di antaranya akan ditemukan tidak/belum pernah sekolah dan sekitar 11 hingga 12 anak tidak sekolah lagi (*Drop Out*). Kelompok umur 16 – 18 tahun dengan angka APS sebesar 59,75 persen. Artinya dari setiap 100 anak yang berumur 16 – 18 tahun yang ada di Kecamatan Glagah 1 anak di antaranya akan ditemukan tidak/belum pernah sekolah dan sekitar 40 hingga 41 anak tidak sekolah lagi (*Drop Out*).

Angka APS Kecamatan Glagah ini apabila dibandingkan dengan angka APS Kecamatan Banyuwangi masih relatif tertinggal, karena angka APS pada kelompok umur 16 – 18 tahun masih berada di bawah angka APS Kecamatan Banyuwangi. Jadi tingkat capaian situasi pembangunan manusia melalui program pembangunan bidang pendidikan masih belum berhasil. Keterkaitannya dengan keberhasilan program pendidikan dasar sembilan tahun di Kecamatan Glagah, berdasarkan angka APS dan putus sekolah sebagaimana belumlah cukup untuk dikategorikan berhasil. Karena mereka yang putus sekolah ditambah dengan yang tidak/belum pernah sekolah jumlahnya masih ada.

Kajian berikutnya adalah angka melek huruf. Angka melek huruf ini diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk berumur  $\geq 10$  tahun. Pada tahun 2014 angka melek huruf di Kecamatan Glagah tercatat sekitar 88,21 persen, atau bila diukur dengan angka buta hurufnya sebesar 11,79 persen. Artinya dari setiap 100 penduduk Kecamatan Glagah yang berumur  $\geq 10$  tahun, akan ditemukan antara 11 hingga 12 orang di antaranya belum bisa baca tulis atau buta huruf. Dari angka buta huruf yang sebesar 11,79 persen ini ada sekitar 151.762 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 35.504 orang dan perempuan sebanyak 116.258 orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5.



Tabel 4.5 Angka Buta Huruf di Kecamatan Glagah Tahun 2014 (%)

Wilayah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%
Oleh Sari	2.793	0,49	11.640	2,18	14.433	2,67
Kemirin	6.366	0,79	28.188	2,54	34.555	3,33
Taman Suruh	10.252	0,59	32.864	1,68	43.117	2,27

Sumber: BPS Kecamatan Glagah

## 2. Indikator Kesehatan

Mendasarnya kebutuhan kesehatan bagi setiap orang sama halnya dengan mendasarnya kebutuhan pendidikan. Terkait dengan hal tersebut pemerintah kerap mencanangkan program-program yang diarahkan untuk memajukan tingkat capaian pembangunan di bidang kesehatan ini. Seperti Indonesia Sehat Tahun 2010, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dan seterusnya. Untuk mengukur tingkat capaian program pembangunan bidang kesehatan ada beberapa variabel yang biasa digunakan oleh para pemerhati. Di antaranya adalah Angka Kematian Bayi (AKB), balita gizi buruk dan pemberian imunisasi terhadap balita. Dari variabel AKB.

AKB di Kecamatan Glagah jumlahnya tergolong riabel balita gizi buruk. Ada empat katagori dalam pengklasifikasian status gizi balita, yaitu buruk, kurang, baik dan lebih. Berdasarkan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 kondisi gizi buruk dan kurang jumlahnya tampak menurun, kondisi yang demikian ini searah dengan jumlah gizi buruk dan kurang rata-rata balita di Kecamatan Banyuwangi. Demikian juga untuk status gizi baik dan lebih yang kenaikan angkanya searah dengan kenaikan angka Kecamatan Banyuwangi. Artinya perbaikan gizi balita yang terjadi di Kecamatan Glagah tampak berhasil yang didukung dengan rendahnya jumlah balita gizi buruk dan kurang yang angkanya berada di bawah angka Kecamatan Banyuwangi. Untuk balita atau anak usia 1 sampai dengan 4 tahun pada tahun 2014 kelengkapan imunisasinya masih perlu mendapat perhatian serius, karena dari sejumlah balita yang ada di Kecamatan Glagah baru sebanyak 96,89 persen yang mendapatkan

imunisasi. Khusus untuk balita berumur 0 – 11 bulan atau balita umur < 1 tahun dengan angka 88,69 persen yang sudah pernah mendapatkan pelayanan imunisasi. Hal ini menunjukkan masih belum berhasilnya program Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) di Kecamatan Glagah. Dari ketiga variabel kesehatan ini dua di antaranya yaitu AKB dan balita gizi buruk masih belum layak apabila disajikan sampai dengan tingkat wilayah Kecamatan Glagah. Karena keterbatasan jumlah sampel yang digunakan serta kejadian di lapangan dari kedua variabel itu sangatlah jarang terjadi. Misalnya kematian bayi per seribu kelahiran, akan dibutuhkan setidaknya ada seribu kelahiran di wilayah Kecamatan Glagah dan hal ini kecil kemungkinannya untuk terjadi.

c. Indikator Daya Beli

Pada dasarnya indikator daya beli ini bisa didekati dengan menggunakan indikator lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemampuan daya beli penduduk dalam suatu daerah. Di antara indikator itu adalah indikator ketenagakerjaan, karena dengan tersedianya perluasan usaha dan kesempatan kerja sudah barang tentu akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan penduduk bagi daerah tersebut

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angka TPAK dihitung berdasarkan jumlah angkatan kerja dibagi dengan usia kerja dalam persen. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan, yang dimaksud dengan membutuhkan pekerjaan di sini bisa saja penduduk tersebut sudah memiliki pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, sudah diterima tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa sebagai akibat dari usahanya dalam mencari pekerjaan yang tidak pernah berhasil tetapi masih mengharapkan dari pekerjaan yang mereka cari tersebut.

Pada tahun 2014 penduduk Kecamatan Glagah yang membutuhkan pekerjaan ada sekitar 70,37 persen yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 44,79 persen dan perempuan 25,58 persen. Sedang selebihnya yang sebanyak

29,63 persen merupakan akumulasi dari jumlah penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga dan mereka yang melakukan kegiatan lain seperti hanya melakukan olahraga dan sejenisnya.

Adapun indikasi dari angka TPAK ini masih belum bisa dipastikan apakah semakin tinggi angka TPAK akan memberikan informasi semakin baik pula kegiatan yang diukur dengan indikator ini. Karena masih harus dilihat seberapa banyak mereka yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, sudah diterima tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa sebagai akibat dari usahanya dalam mencari pekerjaan yang tidak pernah berhasil tetapi masih mengharapkan dari pekerjaan yang mereka cari tersebut apabila ikut naik, maka angka TPAK yang tinggi tidak akan mempunyai makna yang signifikan.

## 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Secara matematis angka TPT ini dihitung berdasarkan hasil pembagian antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dalam persen. Indikator ini mengukur tingkat pengangguran terbuka di kalangan angkatan kerja. Indikasi dari indikator ini apabila semakin rendah angkanya maka semakin baik pula angka pengangguran di daerah tersebut. Adakalanya angka TPT ini dibedakan menurut jam kerja dan pendidikan dari para pencari kerja. Berdasarkan jam kerja didefinisikan apabila jam kerjanya selama seminggu kurang dari 35 jam terhadap jam kerja normal dikategorikan sebagai pengangguran terselubung, dan berdasarkan pendidikan menghasilkan tingkat pengangguran terdidik. Dalam hal ini pendidikan dibedakan menurut jenjangnya seperti Sekolah Dasar (SD) sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat dan seterusnya.

Pada tahun 2014 angka TPT di Kecamatan Glagah tercatat sekitar 4,05 persen. Artinya dari 850.200 orang penduduk yang berumur 15 – 59 tahun yang berstatus angkatan kerja, sebanyak 34.460 orang di antaranya menyandang katagori penganggur. Dari sejumlah penganggur ini ada sekitar 22.182 orang berjenis kelamin laki-laki dan 12.278 orang perempuan. Alasan mereka sebagai pengangguran yang mencari pekerjaan sebagai akibat dari tanggungjawab mencari

nafkah ada sebanyak 15.596 orang (45,26 %), karena tamat sekolah atau tidak sekolah lagi ada sekitar 13.281 orang (38,54 %), mereka yang beralasan menambah penghasilan ada sebanyak 1.950 orang (5,66 %) dan yang beralasan lainnya selain ketiga alasan tersebut jumlahnya mencapai 3.633 orang (10,54 %).

Keterkaitan antara angka TPAK dengan TPT (Kedua indikator) ini sebetulnya saling terkait satu dengan yang lain. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa apabila diperoleh angka TPAK tinggi yang diikuti dengan angka TPT yang rendah, maka kemajuan atau tingkat capaian dalam menanggulangi pengangguran bagi daerah tersebut bisa dikategorikan berhasil. Pada tahun 2014 angka TPAK dan TPT di Kecamatan Glagah dapat dikategorikan sebagai tingkat capaian yang berhasil dalam menanggulangi pengangguran, keadaan yang demikian ini didukung oleh pergeseran angka TPAK dan TPT tahun 2013 yang bergerak lebih baik ke arah tahun 2014.6.

Keberhasilan dalam menanggulangi pengangguran ini apabila dikaji sampai dengan wilayah Kecamatan Glagah akan memberikan indikasi yang berbeda antar satu kecamatan dengan yang lain. Angka TPT tertinggi terdapat di Kecamatan Glagah yang mencapai 6,51 persen, serta terendah ada di Wilayah Kecamatan Glagah Benciluk dengan angka TPT sebesar 1,39 persen. Akibatnya dari keragaman angka TPAK dan TPT yang terjadi antar wilayah Kecamatan Glagah tersebut, akan mempengaruhi kemampuan antar wilayah Kecamatan Glagah dalam usahanya menanggulangi pengangguran.

Kecamatan Glagah tampak sebaliknya, yaitu telah mengalami kemunduran dalam menangani pengangguran yang terjadi di wilayahnya. Tampak yang demikian ini didukung oleh angka TPAK dan TPT tahun 2013 yang bergerak menurun ke arah tahun 2014. Menurunnya angka TPT yang demikian ini tentunya bagi setiap daerah merupakan harapan dan sekaligus acuan sebagai gambaran atau kondisi ketenagakerjaan bagi daerah yang bersangkutan. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi gambaran yang obyektif dan faktual tentang Ketenagakerjaan menjadi bahan evaluasi dan sekaligus menjadi bahan perencanaan pembangunan di masa mendatang yang lebih komprehensif. Sedangkan bagi para akademisi, peminat dan pemerhati masalah



sosial angka TPT ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi ketika mengkaji kondisi ketenagakerjaan di Kecamatan Glagah.

Bahkan secara luas angka TPT ini merupakan salah satu dari indikator makro ekonomi dan sosial yang kerap dikaji dan dipergunakan oleh para pengambil keputusan dalam kaitannya dengan keberhasilan pembangunan. Karena ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia yang mencakup dimensi ekonomi maupun sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan adalah berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap individu untuk berkarya dalam suatu bidang pekerjaan. Oleh karena itu upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Pengangguran menurut kelompok umur. Umumnya para pencari kerja di Kecamatan Glagah pada tahun 2014 didominasi oleh mereka-mereka yang berumur 15 – 19 tahun. Jumlahnya ada sekitar 13.890 orang atau sebesar 40,31 persen dari total penganggur. Alasan utama dalam upayanya mencari pekerjaan dari kelompok umur ini dilatarbelakangi karena sudah merasa tamat sekolah atau sudah tidak sekolah lagi yang jumlahnya mencapai 9.409 orang. Urutan kedua pada kelompok umur 20 – 24 tahun yang berjumlah 8.394 orang. Alasan utama dari kelompok umur ini dalam usahanya mencari pekerjaan sama dengan kelompok umur 15 – 19 tahun yaitu merasa tamat sekolah atau sudah tidak sekolah lagi yang jumlahnya mencapai 3.386 orang.

Para pencari kerja di Kecamatan Glagah itu apabila dibedakan menurut jenis kelamin dan kelompok umurnya, tampak penduduk laki-laki lebih berupaya untuk memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan perempuan. Karena penduduk laki-laki sejak memasuki usia produktif umur 15 tahun hingga umurnya mencapai tidak produktif lagi yaitu umur 60 tahun mereka terus membutuhkan pekerjaan. Berbeda dengan penduduk perempuan yang ketika memasuki usia produktif umur 15 tahun hingga berumur 39 tahun saja yang membutuhkan pekerjaan, selebihnya mereka yang berumur 40 – 59 tahun lebih menyukai mengurus rumah tangganya dari pada harus mencari pekerjaan



### 3) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Formula matematis yang digunakan untuk menghitung indikator ini diperoleh dengan cara jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan indikator ini untuk mengukur seberapa besar tingkat penyerapan terhadap angkatan kerja. Yang dimaksud dengan kesempatan kerja di sini jangan diartikan ada lowongan kerja, namun hanya sebuah istilah yang terkait dengan penduduk yang bekerja saja. Indikasinya apabila angka TKK ini semakin tinggi maka penyerapan terhadap angkatan kerja semakin baik. Atau pemenuhan dan perluasan kesempatan kerja bagi daerah yang bersangkutan dapat dikategorikan berhasil.

## 2. Analisis Kemiskinan Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Data Kualitatif

Analisis kemiskinan masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi juga didasarkan pada data yang bersifat kualitatif dimana data tersebut berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap informan terpilih dalam penelitian seperti dijelaskan berikut.

### a. Deskripsi Informan

Pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh 4 orang informan pokok dan 3 orang informan tambahan. Yang menjadi informan pokok yaitu para masyarakat Osing yang melakukan aktifitas pekerjaannya di lingkungan Masyarakat Osing Kecamatan Glagah dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan petani, buruh tani dan pedagang merupakan pekerjaan pokok
- 2) Masyarakat Osing yang sudah berkeluarga
- 3) Jenis kelamin

Informan pokok yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam Tabel 4.6

Tabel 4.6. Identitas Informan Pokok

No	Nama Informan	Status Informan Dalam Penelitian
1.	S. Taman	Informan A
2.	Asmu'i	Informan B
3.	Parnoto	Informan C
4.	Untung Utomo	Informan D

Sumber: Data Primer 2015

1) Usia Informan

Usia informan utama merupakan karakteristik informan utama yang membedakan tingkat kemampuan dan kedewasaan informan utama. Semakin dewasa usia seseorang maka tingkat kematangan berfikir dan bertindak semakin baik. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya pengalaman dan wawasan yang dimiliki. Usia merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena sebagai batasan kemampuan untuk melakukan kegiatan dalam kehidupannya dan tinggi rendahnya usia menentukan kapan seseorang dapat bekerja. Usia juga merupakan modal dasar dalam kehidupan, dalam banyak jenis pekerjaan standar usia menjadi syarat penerimaan dan menjadi batas bagi seseorang untuk bekerja, berhenti dari pekerjaan oleh karena faktor usia yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Oleh karena itu perbedaan usia seseorang selalu menunjukkan adanya kematangan dalam berfikir, juga kekuatan fisik dalam beraktivitas.

Tabel 4.7 Usia Informan Pokok

No	Nama Informan	Usia
1.	S. Taman	50 tahun
2.	Asmu'i	45 tahun
3.	Parnoto	46 tahun
4.	Untung Utomo	54 tahun

Sumber: Data Primer 2015, diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa keempat informan masih masuk usia lansia. Usia tertinggi yaitu 50 tahun sebanyak 2 orang, usia 46 tahun sebanyak 1 orang, dan usia terendah yaitu 45 tahun sebanyak 1 orang. Usia yang masih

produktif mereka masih layak bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga seperti halnya pekerjaan petani, buruh tani dan pedagang yang dijalani saat ini. Usia yang dimiliki tersebut seharusnya informan utama memiliki kematangan berfikir dan bertindak yang semakin baik yang digunakan untuk berdagang memenuhi kebutuhan keluarga.

#### 4.1.5 Pendidikan Informan

Tingkat pendidikan informan utama adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh oleh informan utama dan ditunjukkan dengan bukti ijazah. Pendidikan sedikit banyak dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang dan bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Banyak masyarakat yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak karena pendidikannya rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dapat dinyatakan bahwa pendidikan informan pada umumnya hanya berpendidikan rendah meskipun ada yang berpendidikan SMP. Data lebih jelas mengenai pendidikan informan dapat dilihat dari Tabel 4.8

Tabel 4.8. Tingkat Pendidikan Informan Pokok

No	Nama Informan	Pendidikan
1.	S. Taman	SD
2.	Asmu'i	SD
3.	Parnoto	SD
4.	Untung Utomo	SD

Sumber: Data Primer 2015, diolah

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa semua informan berpendidikan tamat SD/ sederajat. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya para masyarakat Osing menjadi petani, buruh tani dan pedagang tentunya tidak terlalu membutuhkan tingkat pendidikan untuk menggeluti pekerjaannya. Pada umumnya informan yang berpendidikan rendah disebabkan oleh biaya. Penghasilan orang tua yang tidak seberapa besar tidak cukup untuk biaya sekolah. Disisi lain

mungkin karena faktor ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga yang mengharuskan informan bekerja

#### 4.1.6 Kemiskinan di Kecamatan Glagah Banyuwangi

Seperti yang telah disebutkan di tinjauan pustaka bahwa Snel dan Staring dalam Setia (2005:6) mengemukakan bahwa upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi. Melalui upaya ini seseorang bisa berusaha untuk menambah penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat pengurangan kuantitas dan kualitas barang atau jasa.

Berkaitan dengan konsep di atas, pekerjaan petani, buruh tani dan pedagang di lingkungan Masyarakat Osing Kecamatan Glagah pada saat tertentu menghadapi kondisi sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi yang seperti itu dialami para Masyarakat Osing untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suharto (2009:29), sebagai *Coping upayaes*. Secara umum upaya mengatasi kemiskinan (*coping upayaes*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya.

Pekerjaan masyarakat Osing dilakukan karena kurangnya lapangan pekerjaan terutama yang memiliki pendidikan dan keterampilan kurang seperti Masyarakat Osing. Menurut Iqbal (2014:45) lebih menekankan pada aspek kurang tersedianya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat yang ada di daerah pedesaan juga berupaya menjadi petani, buruh tani dan pedagang. Masyarakat Osing tersebut berkeliling mencari sampah agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, karena jika hanya berdiam di suatu tempat saja maka tidak akan mendapatkan penghasilan.

Oleh karena itu dalam pembahasan ini peneliti akan membahas mengenai upaya masyarakat Osing pada saat menjadi petani, buruh tani dan pedagang di Masyarakat Osing Kecamatan Glagah yang dimaksudkan untuk menggali data secara mendalam mengenai bentuk-bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan



keluarga para masyarakat Osing untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

#### 4.1.7 Kondisi Kehidupan Masyarakat Osing dalam Kemiskinan

##### a. Alasan pemilihan pekerjaan petani, buruh tani dan pedagang

Masyarakat Osing merupakan salah satu pekerjaan di sektor informal yang mempunyai ciri-ciri salah satunya adalah pola kegiatannya tidak teratur, baik waktu, modal maupun penerimaannya. Dalam melakukan pekerjaannya para masyarakat Osing menentukan sendiri kapan mereka mulai menjadi petani, buruh tani dan pedagang setiap harinya maupun hari libur untuk bekerja. Namun biasanya para masyarakat Osing mengakhiri pekerjaannya setelah menemukan banyak sampah..

Pada umumnya masyarakat Osing bekerja petani, buruh tani dan pedagang karena kurangnya pendidikan dan modal sehingga tidak dapat memilih pekerjaan lain. Hal itu ditegaskan oleh Informan S.Taman :

“Lah kita mau kerja apa lagi mas. Wong ijazah SMP dan keterampilan ga punya ya ga laku kerja di kantoran. Daripada mencuri mending cari sampah bisa buat beli bahan pokok”(S.Taman: 4 April 2015)

Seperti yang diungkapkan oleh informan Asmu'i:

“ya dik..wong saya ini ga punya pendidikan tinggi cuman SMP. Mau kerja kuli berat ga kuat jadi mending menjadi petani, buruh tani dan pedagang gini aja, yang penting halal”(Asmu'i: 4 April 2015)

Menurut informan Parnoto:

“Saya tidak bisa kerja lain dik. Ijazah rendah dan tidak punya keterampilan. Oleh karena itu, menjadi petani, buruh tani dan pedagang saja tidak apa-apa, dapat uang juga buat keluarga ” (Parnoto: 7 April 2015)

Berdasarkan pernyataan beberapa informan dapat dijelaskan bahwa alasan memilih pekerjaan petani, buruh tani dan pedagang karena pendidikan rendah dan kurang biaya untuk sekolah sehingga tidak ada pekerjaan lain yang



bisa dilakukan sehingga menjadi Masyarakat Osing untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut Suharto (2009:31) menyatakan upaya mengatasi kemiskinan (*coping upayaes*) dalam mengatasi goncangan dan tekanan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai cara melakukan aktivitasnya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pekerjaan Masyarakat Osing yang dilakukan sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan salah satu potensi yang dimiliki Masyarakat Osing dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarganya.

b. Aktivitas Masyarakat Osing

Para masyarakat Osing memilih menjadi petani, buruh tani dan pedagang di Masyarakat Osing Kecamatan Glagah. Pekerjaan menjadi petani, buruh tani dan pedagang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga perlu dilakukan setiap hari. Hal itu diungkapkan oleh informan S.Taman;

“Aku menjadi petani, buruh tani dan pedagang setiap hari kalau tidak menjadi petani, buruh tani dan pedagang tidak makan nanti dik tapi kalau ada acara malam hari kayak tahlilan atau diundang tetangga pulangnye baru menjadi petani, buruh tani dan pedagang kecuali pas sakit. Tapi kalau masih bisa menjadi petani, buruh tani dan pedagang pasti menjadi petani, buruh tani dan pedagang tiap hari” (S.Taman: 4 April 2015)

Pernyataan itu didukung oleh informan B:

“Ya, menjadi petani, buruh tani dan pedagang setiap hari dik buat makan soalnya. Kalau tidak menjadi petani, buruh tani dan pedagang tidak bisa makan dan kasi sanga anak-anak” (Asmu’i: 4 April 2015)

Informan Untung Utomo mengatakan:

“Menjadi petani, buruh tani dan pedagangnya tiap hari dik kecuali sakit wong ujan saja menjadi petani, buruh tani dan pedagang kok tetep di Oleh sari, Kemirin” (Untung Utomo: 7 April 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diungkapkan bahwa pekerjaan petani, buruh tani dan pedagang dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan tidak akan libur kecuali sakit dan mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa

Masyarakat Osing menjadikan pekerjaan menjadi petani, buruh tani dan pedagang sebagai pekerjaan rutin dan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, masyarakat Osing benar-benar mencari lokasi yang tepat untuk menjadi petani, buruh tani dan pedagang salah satunya lokasi sekitar Masyarakat Osing Kecamatan Glagah.

Masyarakat Osing dalam menjadi petani, buruh tani dan pedagang memilih lokasi di sekitar Masyarakat Osing Kecamatan Glagah saja. Soalnya lokasi ini yang banyak sampah termasuk sampah home industri. Meskipun kadang kala keluar dari Masyarakat Osing Kecamatan Glagah tetapi jaraknya tidak jauh tetap dekat. Hal itu diungkapkan oleh informan S.taman:

“ Saya milih Masyarakat Osing Kecamatan Glagah karena ramai industri mas. Banyak sampah disitu” (S.Taman: 4 April 2015)

Sedangkan ungkapan dari informan Parnoto:

“Oleh Sari, Kemirin ramai dan banyak sampah karena banyak home industri.” (Parnoto: 7 April 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, masyarakat Osing memilih Masyarakat Osing Kecamatan Glagah untuk lokasi menjadi petani, buruh tani dan pedagang karena Masyarakat Osing Kecamatan Glagah merupakan lokasi yang ramai, padat penduduk sehingga merupakan lokasi yang banyak sampah.

Selain menjadi petani, buruh tani dan pedagang di daerah Masyarakat Osing Kecamatan Glagah, ada beberapa tempat di Oleh sari, Kemirin yang dapat digunakan untuk menjadi petani, buruh tani dan pedagang apabila kondisi Oleh sari, Kemirin tidak memungkinkan untuk menjadi petani, buruh tani dan pedagang. Hal itu diungkapkan oleh pernyataan informan Asmu'i:

“Kalau Oleh sari, Kemirin sepi saya menjadi petani, buruh tani dan pedagang di sekitar desa lain” (Asmu'i: 4 April 2015)

Menurut informan Untung Utomo:

“ Aku menjadi petani, buruh tani dan pedagang kadang-kala di depan kelurahan, depan pabrik baru ke tempat disekitar penduduk”

Demikian juga dengan informan Asmu'i yang di wawancarai tanggal 11 April 2015:

“Menjadi petani, buruh tani dan pedagang di sini aja mas ramai banyak orang dan ga jauh jalannya. Saya muter-muter aja di Oleh sari, Kemirin udah cukup” (Asmu'i: 11 April 2015)

Berdasarkan jawaban informan dapat disimpulkan bahwa mengambil jualan hanya disekitar Masyarakat Osing Kecamatan Glagah saja. Hal itu dilakukan karena Masyarakat Osing sudah merasa cukup dengan banyaknya penduduk dalam satu lokasi Oleh sari, Kemirin saja meskipun kadang kala menjadi petani, buruh tani dan pedagang di sekitar tetapi tidak terlalu jauh juga. Lokasi menjadi petani, buruh tani dan pedagang sangat menentukan Masyarakat Osing untuk menjadi petani, buruh tani dan pedagang sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Masyarakat Osing mengenai situasi jalanan.

Masyarakat Osing melakukan aktivitas menjadi petani, buruh tani dan pedagang sudah terhitung waktu yang lama. Lama bekerja dalam menjadi petani, buruh tani dan pedagang membuat Masyarakat Osing ini telah memiliki pengalaman dalam menjajakan mengambil jualannya. Hal ini diungkapkan oleh informan Parnoto:

“Wis lama menjadi petani, buruh tani dan pedagangnya hampir tiga tahun menjadi petani, buruh tani dan pedagangnya dik. Lama sudah soalnya tidak ada pekerjaan lagi” (Parnoto: 4 April 2015)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan sudah lama menjalani pekerjaan ini. Hal ini senada dengan ungkapan Untung Utomo:

“Yo..setahun sudah dik kerjanya. Sampai kadang-kadang mikir kapan berubah mempunyai pekerjaan lain” (Untung Utomo: 11 April 2015)

Masyarakat Osing yang sudah dijalani selama setahun menunjukkan bahwa lama bekerja membuat seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam melakukan aktivitas pekerjaanya. Pekerjaan petani, buruh tani dan pedagang dilakukan untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga informan.

Dalam menjadi petani, buruh tani dan pedagang, Masyarakat Osing tidak memiliki jam kerja yang tetap. Berdasarkan data yang telah diperoleh diatas berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Sebenarnya tidak ada kepastian mengenai jam kerja namun umumnya jam kerja masyarakat Osing pada malam hari adalah seperti hasil wawancara yang diutarakan oleh informan S.Taman pada saat diwawancarai tanggal 4 April 2015 yang mengatakan:

"Aku menjadi petani, buruh tani dan pedagangnya malam mas. Soalnya Oleh sari, Kemirin kan penuh penduduk kalau malam hari bekerjanya jadi cocok untuk mengambil jualan di sana". (S. Taman: 4 April 2015)

Hal senada diungkapkan oleh informan Asmu'i pada tanggal 4 April 2015:

"Saya menjadi petani, buruh tani dan pedagang pagi abis banyak orang bekerja "(Asmu'i: 4 April 2015)

Berdasarkan penuturan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka rata-rata bekerja pada malam hari dan pagi. Namun tidak ada waktu yang pasti kapan mereka selesai menjadi petani, buruh tani dan pedagang setiap harinya, tergantung keperluan. Apabila sampah yang terkumpul uda banyak maka pulang. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan Parnoto yang ditemui di Masyarakat Osing Kecamatan Glagah tanggal 7 April 2015:

"Saya menjadi petani, buruh tani dan pedagang mulai jam 06.00 malam sampai biasanya sudah habis semua. Kadang kalau sepi jam 10.00 malam "



Berdasarkan pernyataan ketiga informan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata menjadi petani, buruh tani dan pedagang malam antara jam 07.00-10.00 WIB Oleh sebab itu tidak heran ketika para masyarakat Osing harus memulai pekerjaannya setelah magrib hingga tengah malam. Pendapatan yang diperoleh tergantung dari banyaknya sampah yang diperoleh.

c. Kendala Masyarakat Osing dalam Meningkatkan Pendapatan

Berdasarkan wawancara informan tersebut kendala menjadi petani, buruh tani dan pedagang antara lain hujan dan kondisi kesehatan. Oleh karena itu dalam kondisi tersebut mereka memiliki cara sendiri seperti yang diungkapkan informan Parnoto diwawancarai tanggal 7 April 2015 dimana:

“Lek udan... kurangi jupuk sampah mas. Terus kalau sepi banget saya pindah ke tempat lain disekitar aja yang ga jauh. Yang penting dapat” (Parnoto: 7 April 2015)

Kalau pernyataan dengan informan Untung Utomo:

“Kalau hujan, saya ke tempat lain .Yang ada tempat berteduh. Tapi kalau musim hujan menjadi petani, buruh tani dan pedagang di tempat yang ada tutupnya, kalau di Oleh sari, Kemirin sepi” (Untung Utomo: 7 April 2015)

Sedangkan berdasarkan informan S. Taman:

“Kalau cuaca jelak saya libur wis mas..sia-sia tapi biasanya pakai cara bekerja lain, ne siang kan kerja lainnya jadi malam ga menjadi petani, buruh tani dan pedagang” (S. Taman: 11 April 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kendala dalam menjadi petani, buruh tani dan pedagang dilakukan dengan menjadi petani, buruh tani dan pedagang di tempat lain yang tertutup. Banyaknya Masyarakat Osing yang menjadi petani, buruh tani dan pedagang dan ketergantungan suasana penduduk, padagang sampah harus memiliki cara-cara



dalam menjadi petani, buruh tani dan pedagang. Berbagai pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa ketika penduduk sepi karena hujan sangat berpengaruh terhadap kondisi usaha mereka petani, buruh tani dan pedagang. Terdapat suatu kondisi yang berbeda bagi masyarakat Osing di sekitar Masyarakat Osing Kecamatan Glagah yaitu ketika sakit dan cuaca tidak hujan dimana kondisi tersebut berpengaruh pada penghasilan mereka.

Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat Osing dalam menjadi petani, buruh tani dan pedagang yaitu persaingan antar masyarakat Osing dan perilakunya dalam berdagang. Hasil wawancara dengan informan Asmu'i:

“ Saingan lumayan banyak tetapi kalau uang ya tetap dapat” (Asmu'i, 4 April 2015)

Sedangkan menurut informan Parnoto:

“Antar Masyarakat Osing tapi tidak musuhan jadi kalau Masyarakat Osing satu butuh Masyarakat Osing lain bantu..sama-sama cari rejeki” (Parnoto: 7 April 2015)

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa persaingan antar masyarakat Osing termasuk persaingan sehat bahkan tidak jarang saling menolong antar satu sama lain. Yang menarik untuk dibahas adalah dengan kondisi yang berbeda mereka tetap memiliki kebutuhan yang harus mereka penuhi. Oleh karena itu mereka harus memiliki cara agar terus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### 4.1.8 Kebutuhan Yang Harus Dipenuhi

Setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi terutama kebutuhan pokok. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi terkadang menuntut seseorang untuk bekerja lebih giat lagi. Pengeluaran akan semakin banyak ketika mereka harus menyekolahkan anak-anaknya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh informan S. Taman:

“Kebutuhan pokok yang pasti itu makan, lainnya itu listrik, , dan banyak lagi apalagi sementara serba mahal. Kadang kala kebutuhan lain-lain seperti hajatan dan kondangan pasti mengeluarkan biaya” (S. Taman: 4 April 2015)

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh informan Asmu’i:

"Yang pasti makan dan biaya sekolah paling mahal. Makanya saya harus memenuhi kebutuhan itu dengan menambah penghasilan di pagi hari. Kalau tidak tidak cukup buat hidup"(Asmu’i: 4 April 2015)

Sedangkan informan Untung Utomo mengungkapkan pernyataan yang senada dengan para informan sebelumnya:

"Buat makan dan biaya anak sekolah dek. Takutnya kalau tidak sekolah mereka bodoh kayak saya makanya saya pontang panting".(Untung Utomo: 7 April 2015)

Menurut Evers dan Sumardi (1985:2), manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material, baik kebutuhan penting maupun tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan atau konsumsi individu (makan, perumahan, pakaian) maupun keperluan pelayanan sosial tertentu (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan). Sesuai apa yang dikatakan oleh Evers dan Sumardi (1985:2) begitu juga dengan para masyarakat Osing, mereka memiliki kebutuhan kebutuhan yang harus mereka penuhi, apalagi mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan akan diri sendiri tetapi juga memenuhi kebutuhan istri serta anak-anaknya. Dari pengakuan keempat informan tersebut memiliki kebutuhan yang hampir sama. Pendidikannya tidak terlalu tinggi, bahkan ada yang hanya tamat SD, tetapi mereka belajar dari pengalaman bahwa mereka merasa pendidikan itu penting. Meski biaya sekolah dirasa cukup mahal mereka tetap berusaha demi menyekolahkan anak-anaknya. Seperti teori yang dikemukakan oleh Maslow yang dikutip oleh Sumarnonugroho (dalam Hartanto 2007:16) bahwa kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu:

- a. Kebutuhan-kebutuhan fisik (udara, air, makan, dan sebagainya);
- b. Kebutuhan rasa aman (jaminan agar dapat bertahan dalam penghidupan dan; kehidupan serta terpuaskan kebutuhan dasarnya secara berkesinambungan);
- c. Kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi;
- d. Kebutuhan untuk penghargaan (dari dirinya dan pihak lain);
- e. Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri dan bertumbuh.

#### 4.1.9 Upaya Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Osing

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa jumlah penduduk dan cuaca sangat berpengaruh pada penghasilan masyarakat Osing. Masyarakat Osing layaknya masyarakat yang lain mereka memiliki kebutuhan termasuk kebutuhan pokok yang rutin harus dipenuhi setiap hari. Dengan kondisi dimana penghasilan mereka berkurang selama sepi, sedangkan kebutuhan tetap harus dipenuhi. Apalagi para masyarakat Osing yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Hal itu juga mengatasi kemiskinan dari kemiskinan yang melilit merka selama ini

Mengenai kondisi tersebut peneliti menanyakan bagaimana cara mereka untuk tetap bisa bertahan memenuhi kebutuhan hidup. Berikut ini merupakan hasil wawancara mengenai upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang dilakukan oleh para informan dalam menjadi petani, buruh tani dan pedagang.

- a. Melakukan pekerjaan pokok

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Osing memiliki pekerjaan tambahan pada pagi atau siang hari serta pekerjaan pokok menjadi petani, buruh tani dan pedagang pada malam hari. Menurut informan S. Taman menyatakan sebagai berikut:

“Saya kerja seharian ampe tengah malam. Kalau pagi saya sebagai jualan kalau malam saya menjadi petani, buruh tani dan pedagang. Maklum mbak kalau tidak begitu tidak akan cukup. Itu saja hasilnya masih kurang-kurang buat hidup. (S.Taman, 4 April 2015)

Demikian juga informan Asmu;i:

“Kalau pagi saya menjadi petani, buruh tani dan pedagang itu dik. tetapi tetap sik kurang. Biaya hidupnya banyak banget soalnya. Makanya itu aku cari tambahan lagi selain mengambil jualan di Masyarakat Osing Kecamatan Glagah, bisa buat nambah belanja soale” (Asmu’i: 4 April 2015)

Selain itu, Dalam membantu kepala keluarga dalam upaya pemenuhan kebutuhan istri informan Parnoto bekerja sebagai tukang cuci baju, hal ini dinyatakan oleh informan tambahan Supiani yang diwawancarai tanggal 4 Agustus :

“kalo saya pagi-pagi itu nyuci baju tetangga dik, 2 hari sekali, sudah ada beberapa langganan juga, lumayan buat nambah-nambah sangu anak”

Sedangkan informan tambahan Painem menyatakan :

“untung mbak saya ini dari jam 5 pagi sampe 3 sore kerja dirumah orang jadi pembantu gitu buat bersih-bersih dan masak, jadi saya bisa bantu bapak buat nambahin belanja atau keperluan lainnya, kalo bapak rame ya pendapatannya saya, bisa dibuat nabung”. (7 April 2015)

Masyarakat Osing melakukan aktivitas utama sesuai dengan potensi yang ada dan aktivitas yang biasa dilakukan dlaam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suharto (2009:31) menyatakan upaya mengatasi kemiskinan (*coping upayaes*) dalam mengatasi goncangan dan tekanan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut dapat dikelompokkan sebagai upaya aktif, yaitu upaya yang mengoptimalkan segala potensi keluarga untuk (misalnya melakukan aktivitasnya sendiri, memperpanjang jam kerja, memanfaatkan sumber atau tanaman liar di lingkungan sekitarnya dan sebagainya). Masyarakat Osing melakukan pekerjaan petani, buruh dan pedagang sebagai salah stau upaya mengatasi kemiskinan merupakan upaya aktif yang sesuai dnegan pekerjaannya yang telah dilakukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga.



b. Meminjam uang kepada tetangga dan kerabat

Informan S. Taman menyatakan sebagai berikut:

"kalau buat makan atau biaya sekolah kurang kadang pinjam dulu sama tetangga, nanti kalo menjadi petani, buruh tani dan pedagangnya rame lagi bisa dibayar. Masalahnya kan bapak ini pengeluarannya banyak,,saya anak pertama kadang mbantu saudara, mbantu ponakan saya yang sekolah itu, karena bapaknya kerjanya tidak pasti. Kalo pas sepi ya susah mau mbantu, buat sekolanya anak saya aja masih kurang"(S. Taman: 4 April 2015)

Corner mengemukakan pola-pola hubungan sosial yang berbasis unsur kekerabatan, ketetanggaan, dan persahabatan untuk kepentingan tukar-menukar sumber daya, secara timbal balik merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh penduduk miskin untuk menjaga konsistensi kelangsungan hidupnya. Pengakuan dari informan S. Taman diatas menunjukkan pada peneliti bahwa penghasilannya petani, buruh tani dan pedagang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari informan dan keluarganya. Bahkan terkadang informan bisa membantu membiayai sekolah anak dari saudaranya. Namun informan terpaksa harus meminjam uang kepada tetangga untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan utang itu bisa dikembalikan lagi, kerabat biasanya menjadi tempat tinggal awal dalam jaringan sosial yang dimintai bantuan untuk mengatasi masalah ekonomi (Kusnadi: 2000). Minimnya penghasilan juga membuat informan tidak bisa lagi membantu saudaranya dan penghasilan kembali normal. Pernyataan informan A tersebut juga diperkuat oleh istrinya sebagai informan tambahan.

Upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang digunakan oleh informan pokok A yaitu memanfaatkan jaringan sosialnya dengan cara meminjam uang. Suharto (2009:31) menyatakan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengatasi kemiskinan, seseorang dapat melakukan upaya jaringan, misalnya menjalin relasi, baik formal maupun informal dengan lingkungan sosialnya, dan lingkungan kelembagaan ( misalnya: meminjam uang dengan tetangga, mengutang di warung, memanfaatkan program kemiskinan,



meminjam uang ke rentenir atau bank, dan sebagainya). Demikian juga Seperti yang dikatakan oleh Corner dalam Kusnadi (1962: 187-189) mengemukakan beberapa upaya yang dikembangkan untuk menjaga kelangsungan hidup. Diantaranya adalah:

- a. Melakukan beraneka ragam pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Pekerjaan-pekerjaan yang tersedia di desa dan dapat merendahkan martabat pun akan tetap diterima kendati upahnya rendah. Ganjaran atau bahasan berupa pangan membuat suatu pekerjaan menjadi lebih menarik.
- b. Jika kegiatan-kegiatan tersebut masih kurang memadai, penduduk miskin akan berpaling pada sistem penunjang yang ada di lingkungannya. Sistem ikatan kekerabatan, ketetanggaan, dan pengaturan tukar-menukar secara timbal balik merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi penduduk miskin. Dalam menghadapi penghasilan dan peluang yang semakin merosot tajam, penduduk miskin ini masih dapat bertahan dengan harapan para kerabat dan keluarganya, tetangga dan teman-temannya berbagai kelebihan apapun yang mereka miliki. Pola-pola hubungan sosial demikian memberi rasa aman dan terlindungi bagi orang miskin. Bekerja lebih banyak meskipun lebih sedikit masukan, upaya yang bersifat ekonomis ini ditempuh untuk mengurangi tingkat kebutuhan konsumsi sehari-hari.
- c. Memilih alternatif lain jika ketiga alternatif diatas sulit dilakukan dan kemungkinan untuk tetap mengatasi kemiskinan didesa sudah sangat Rumah tangga miskin tersebut harus menghadapi pilihan terakhir agar segera meninggalkan desa dan bermigrasi ke kota

Setelah ramai penduduk lagi dan pendapatannya kembali normal, informan bisa mengembalikan uang yang ia pinjam dari tetangganya. Informan lebih memilih meminjam uang kepada tetangganya karena atas dasar saling percaya. Mengatur pola konsumsi dilakukan para masyarakat Osing untuk bisa hidup hemat dan menyisihkan sedikit pendapatannya

pada saat pendapatan sedang meningkat. Ketika pendapatan sedang menurun mereka bisa menggunakan tabungan tersebut untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Dimana kebutuhan pokok sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia yang terdiri dari kebutuhan konsumsi individu yaitu pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Konsumsi yang meliputi unsur pangan, sandang, papan (pemukiman). Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh informan Untung Utomo yang telah diwawancarai oleh peneliti, informan tersebut mengatakan sebagai berikut:

"Kalau rame nabung 20.000 tiap hari kan banyak itu, berapa wes kalo sebulan tiap hari 20.000? kadang lebih... itu yang saya tabung buat makan, ya buat biaya sekolahnya anak, semua wes dek. Masak mau sepi terus, kan nggak. Nanti kan waktu sepi enak, kalo lagi sepi gitt bisa pake uang tabungan itu. Bapak mau kerja yang lain ya kerja apa, ya cuma kerja ini. Nanti kalo kerja lain belum tentu bisa".

Pernyataan informan Untung Utomo juga didukung oleh informan tambahan Bowo Prasugito, sebagai putra informan Untung Utomo menyatakan:

"Kalau sepi, jadi menjadi petani, buruh tani dan pedagangnya dikurangi. Kalo gak dikurangi ya nggak habis. Jadi penghasilannya juga sedikit, ya gimana lagi.. daripada menjadi petani, buruh tani dan pedagang banyak tapi nggak habis kan bapak bisa rugi... sulit sudah kalo sepi, yang beli bisa dihitung. Nggak seperti biasanya... biasanya bapak'e bisa nabung. Kebanyakan kan yang beli penduduk. Ya repot.. untung kalo waktu rame itu nabung, bisa buat tambah biaya sehari-hari... mau pindah menjadi petani, buruh tani dan pedagang ya nggak berani bapak, sekarang dimana-mana banyak orang menjadi petani, buruh tani dan pedagang. Takutnya nanti nggak laku".

Tidak jauh berbeda dari pernyataan informan Parnoto, berdasarkan pernyataan informan Untung Utomo tersebut menunjukkan bahwa penghasilannya petani, buruh tani dan pedagang pada saat penduduk sepi juga dirasa kurang. Namun informan Untung Utomo lebih memilih untuk menabung penghasilannya pada saat usahanya sedang ramai. Hasil tabungannya tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya selama sepi sedang berlangsung. Karena mereka sadar kebutuhan hidup selalu ada terlebih kebutuhan pokok termasuk

pendidikan anak-anaknya. Menabung merupakan salah satu cara dia bertahan sampai sepi usai dan penghasilan berjalan normal kembali. Apabila kebutuhan pokok belum terpenuhi karena penghasilan yang minim maka mereka melakukan penghematan (Mumtiah dan Sukamdi,1997). Masih dengan pertanyaan yang sama informan Untung Utomo saat ditemui menyatakan:

"Kalau sepi itu kan ngurangi dagangannya penghasilan tiap harinya nggak seperti hari-hari biasa. Sebenarnya ga cukup kalau sama sekolahnya anak-anak. Kadang pinjam duit sama saudara. Tapi kan kalau pas penghasilan agak lumayan itu bisa membayar hutang, jadi bisa dibuat tambah-tambah biaya.

Berkaitan yang dikemukakan oleh Corner dalam Kusnadi (1962: 187-189) mengenai pola-pola hubungan sosial yang berbasis unsur kekerabatan, ketetanggaan, dan persahabatan untuk kepentingan tukar-menukar sumber daya, secara timbal balik merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh penduduk miskin untuk menjaga konsistensi kelangsungan hidupnya. Begitu dengan upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang dilakukan para informan diatas. Mereka menjalin ikatan kekerabatan dengan tetangga maupun saudara agar mereka dapat juga menjalin kepercayaan sehingga para informan bisa memanfaatkan hubungan kekerabatan tersebut untuk meminjam uang sebagai salah satu cara mereka untuk tetap mengatasi kemiskinan

### **4.3 Pembahasan**

Analisis kemiskinan di Banyuwangi dikaji dengan kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan IPM serta berdasarkan pendapat informan dimana hal itu berdasarkan data wawancara dengan informan. Masyarakat Osing Banyuwangi yang merupakan masyarakat asli Kabupaten Banyuwangi khususnya di Kecamatan Glagah berdasarkan data kemiskinan yang diukur dengan IPM menunjukkan bahwa indikator daya beli ini bisa didekati dengan menggunakan indikator lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemampuan daya beli penduduk dalam suatu daerah.

Indikasi dari angka TPAK semakin tinggi angka TPAK akan memberikan informasi semakin baik pula kegiatan yang diukur dengan indikator Keberhasilan dalam menanggulangi pengangguran ini apabila dikaji sampai dengan wilayah Kecamatan Glagah akan memberikan indikasi yang berbeda antar satu kecamatan dengan yang lain.

Menurunnya angka TPT yang demikian ini tentunya bagi setiap daerah merupakan harapan dan sekaligus acuan sebagai gambaran atau kondisi ketenagakerjaan bagi daerah yang bersangkutan. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi gambaran yang obyektif dan faktual tentang Ketenagakerjaan menjadi bahan evaluasi dan sekaligus menjadi bahan perencanaan pembangunan di masa mendatang yang lebih komprehensif.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh informan, peneliti dapat mengetahui bahwa upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang dia lakukan berbeda dengan informan sebelumnya yaitu informan A, B dan D. Seperti yang dikatakan Comer bahwa seseorang akan memilih alternatif lain ketika mereka dalam keadaan sulit dan menjalankan pekerjaan yang lain. Seperti halnya para informan tersebut yang sudah lama bekerja petani, buruh tani dan pedagang, apabila kondisi sepi maka jualannya berkurang. Comer dalam Kusnadi mengatakan bahwa (1962: 187-189) seseorang akan melakukan beraneka ragam pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Ganjaran atau bahasan berupa pangan membuat suatu pekerjaan menjadi lebih menarik. Begitu juga usaha usaha yang informan Asmu'i, ia menekuni pekerjaan lain selain masyarakat Osing dilakukan agar ia memperoleh tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari.

Upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang dilakukan informan di atas yaitu dengan cara melakukan menambah pekerjaan pokok, dan melakukan upaya penmenjadi petani, buruh tani dan pedagang di saat kondisi sepi. Oleh karena itu mereka memilih cara yang lebih aman yaitu dengan cara menekuni pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika pendapatan sedang menurun. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam



keluarga masyarakat Osing, kebutuhan pokok merupakan prioritas yang utama dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan kemudian diikuti dengan kebutuhan pendidikan.



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan beberapa kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Kemiskinan di Kecamatan Glagah Banyuwangi masih termasuk kategori tinggi. Hal itu dilihat dari indeks pendidikan yang terukur di Kecamatan Glagah angka-nya masih selalu berada di bawah angka rata-rata Kabupaten Banyuwangi. Ini artinya ketertinggalan pembangunan bidang pendidikan di Kecamatan Glagah masih belum bisa teratasi dengan baik. Pada tahun 2014 AHH bagi penduduk Kecamatan Glagah terukur 66,44 tahun. Artinya rata-rata lama hidup bagi penduduk Kecamatan Glagah selama 66 tahun 5 bulan. Jadi tingkat capaian pembangunan di bidang kesehatan untuk Kecamatan Glagah masih belum cukup untuk bisa dikategorikan berhasil, karena selain Kecamatan Glagah mempunyai AHH selama 66,44 tahun yang masih jauh terhadap batasan yang diberikan oleh UNDP.

### 5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dapat diajukan antara lain:

- a. Pihak pemerintah hendaknya meningkatkan kemajuan pembangunan dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat Osing khususnya.
- b. Kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berupa pendidikan gratis itu dapatnya bisa dioperasionalkan dengan mudah. Utamanya ketika memberikan kemudahan terhadap mereka yang tergolong kurang atau tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya terhadap biaya pendidikan. Dalam hal ini agar secara kuantitas penduduk Kabupaten Banyuwangi bisa lebih banyak mengenyam pendidikan, dan diharapkan pendidikan yang ditempuhnya berakhir pada jenjang SMA sederajat.

- c. Operasional Sekolah (BOS). Dana khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan terhadap pembangunan bidang pendidikan secara bertahap <sup>73</sup> untuk peningkatan. Jemput mereka yang tidak bersekolah secara profesional <sup>73</sup> erti terhadap keluarga tidak mampu yang belum pernah sekolah agar memperoleh haknya untuk menjalani pendidikan, serta bagi mereka yang putus sekolah agar dapat kembali ke bangku sekolah.
- d. beberapa program kerja yang terkait dengan Angka Harapan Hidup. Di antaranya berupa pemberian imunisasi terhadap semua balita, menekan angka kematian bayi dan ibu pada saat melahirkan. Adapun melambatnya perkembangan tingkat capaian pada program pembangunan di bidang kesehatan ini pada tahun 2014 telah menjadikan kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Banyuwangi menjadi tertinggal bila diukur dengan menggunakan perbandingan terhadap perkembangan tingkat capaian yang diperoleh setiap kabupaten/kota Banyuwangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ant/BEY. 2010. *Banyuwangi Berpenduduk Miskin Terbesar di Jatim*. Nusantara/Rabu 10 Maret 2010. [http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/03/10/12528/Banyuwangi-Berpenduduk-Miskin - Terbesar-di-Jatim](http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/03/10/12528/Banyuwangi-Berpenduduk-Miskin-Terbesar-di-Jatim) [3 Januari 2015].
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Jawa Timur Dalam Angka*. Jakarta : BPS
- Cahyat, A.2004. Bagaimana kemiskinan diukur?Beberapa Model Perhitungan Kemiskinan di Indonesia. *Governance Brief No. 2. CIFOR*, Bogor. Indonesia
- Darmanto, Herry. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masyarakat Terpencil dalam Majalah Triwulan Perencanaan Pembangunan Edisi 04/IX*. Jakarta: Bappenas. .
- Dian Satria, 2008. *Modal Manusia Dan Globalisasi: Peran Subsidi Pendidikan*. [http://www.diassatria.web.id/wp-content/uploads/2008/12/jurnal- indef-subsidi.pdf](http://www.diassatria.web.id/wp-content/uploads/2008/12/jurnal-indef-subsidi.pdf) . Diakses tanggal 11 Januari 2015
- Hartoyo, Sri. 2007. *Peranan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terhadap Pendapatan Usaha Kecil di Kelurahan Kedung Badak,Kota Bogor*. Tesis Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya. Fakultas Pertanian. IPB.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. [http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS\\_2008\\_MAK3.pdf](http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK3.pdf). Diakses tanggal 11 Januari 2015.
- Hikmat, R. Herry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press. [http://www.jmpk-online.net/Volume\\_8/Vol\\_08\\_No\\_03\\_2005.pdf](http://www.jmpk-online.net/Volume_8/Vol_08_No_03_2005.pdf). Diakses tanggal 11 Januari 2015.
- Korten, David C. dan Sjahrir. 1998. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



- M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta.
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasdian, Fredian Tonny. 2006. Pengembangan Masyarakat (*CommunityDevelopment*). Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. IPB.
- Rahayu, MG Ana Budi. *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. [www.binaswadaya.org]. Diakses pada tanggal 11 Januari 2015.
- Ramirez, A., G. Rains, dan F. Stewart.1998. *Economic Growth and Human Capital*. QEH Working Paper, No. 18
- Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2004. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium*. <http://ejournal.unud.ac.id/?module=detailpenelitian&idf=7&idj=48&idv=181&idi=48&idr=191>. Diakses tanggal 11 Januari 2015.
- Rusli, S. dkk. 1995. *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin*. Jakarta: Gramedia Widiasaran
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business : A Skill Building Approach*. USA : John Wiley and Sons Hic.
- Soemardjan, Selo. 1993. *Kemiskinan: Suatu Pandangan Sosiologis*. Jakarta
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, Pandu. 1991. *Grameen Bank: Sebuah Model Bank Untuk Orang Miskin Di Bangladesh*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi).

- Suharto. 2003. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial dalam Menangani Kemiskinan di Indonesia*. Bandung: STKS Press.
- Suryawati, C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensial*. JMPK. Vol. 08/03/September. Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan. Univesritas Diponegoro.
- Suyana, Achmad. 2003. *Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan, Kumpulan Artikel*. Yogyakarta: BPFE Ekonomi UGM.
- Syahyuti. 2006. *Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi kedelapan. Erlangga: Jakarta.

## Lampiran 1

## PANDUAN WAWANCARA

*(Interview Guide)*

## INFORMAN POKOK

## Identitas informan

- No. Informan :  
Tanggal wawancara :  
1. Nama :  
2. Alamat :  
3. Usia :  
4. Jenis Kelamin :  
5. Pendidikan :

## Pertanyaan

1. Berapa pendapatan sehari-hari dalam pekerjaan?
2. Apakah ada tambahan pendapatan selain dari pekerjaan pokok?
3. Berapa jumlah tanggungan keluarga?
4. Berapa pengeluaran kebutuhan pokoknya setiap hari?
5. Apa jenis pengeluaran anda tiap bulannya?
6. Apa saja upaya dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga anda?
7. Apa saja yang kurang dalam hidup sehari-hari?
8. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah?